

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**“PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI
DI WILAYAH PERBATASAN GUNA MENINGKATKAN NASIONALISME”**

Oleh :

EDDY TARJONO

KOLONEL LAUT (P) NRP. 10078/P

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta atas rahmat dan karunia Tuhan YME, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62, telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional RI sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Peningkatan Kemandirian Ekonomi di Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan Nasionalisme”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 Tahun 2021, tanggal 27 Januari 2021, tentang pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA 62 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA 62 di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor kami yaitu Bapak Dr. Sukendra Martha, M.Sc., M.App.Sc., serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna menyempurnakan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2021

Penulis



EDDY TARJONO

KOLONEL LAUT (P) NRP. 10078/P



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Tarjono
Pangkat : Kolonel Laut (P)
Jabatan : Kasubdit Mingiattadik Ditbintadik Debiddikpimkatnas
Instansi : Lemhannas RI
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta 10110

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Juli 2021
Penulis


EDDY TARJONO

KOLONEL LAUT (P) NRP 10078/P

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Laut (P) Eddy Tarjono
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Judul Taskap : Peningkatan Kemandirian Ekonomi Di Wilayah Perbatasan
Guna Meningkatkan Nasionalisme.

Taskap tersebut di atas ditulis “sesuai/ ~~tidak sesuai~~” dengan juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor : 04 Tahun 2021, karena itu “Layak/~~tidak layak~~” dan “ disetujui/ ~~tidak disetujui~~” untuk di uji.

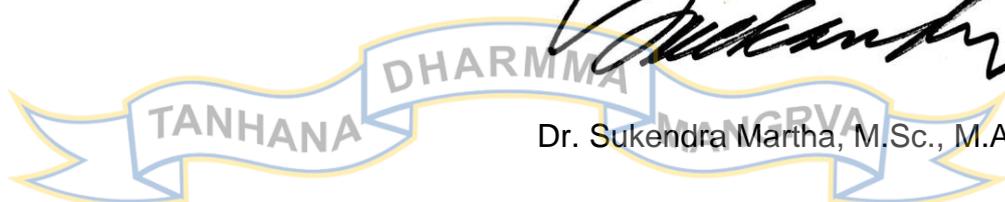
“ Coret yang tidak diperlukan.

Jakarta, Juli 2021

Tutor Taskap



Dr. Sukendra Martha, M.Sc., M.App.Sc.,



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	12
8. Landasan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)	12
9. Landasan Teoretis	13
10. Data dan Fakta	15
11. Pengaruh Lingkungan Strategis	19
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	26
13. Ketergantungan Masyarakat Wilayah Perbatasan terhadap Negara Tetangga	27

14. Perbaikan perekonomian masyarakat di wilayah Perbatasan.....37

15. Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk meningkatna rasa Nasionalisme.....47

BAB IV PENUTUP

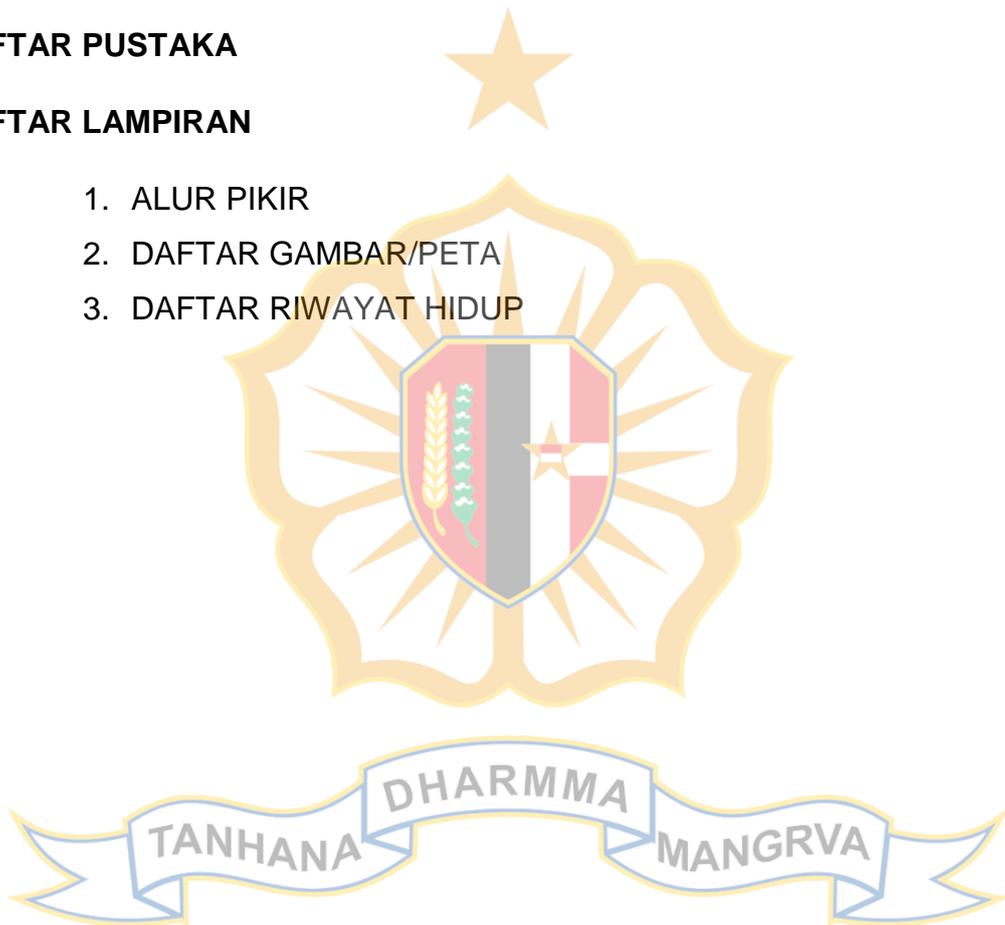
16. Simpulan 58

17. Rekomendasi 59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR/PETA
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Genap satu tahun, sejak Pandemi Covid-19 diumumkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo pada 2 Maret 2020 masuk ke Indonesia. Per 2 Maret 2021, jumlah masyarakat terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.347.026, dengan pasien sembuh sebanyak 1.160.863, dan meninggal sebanyak 36.518 orang¹.

Pada tahun 2019, Indonesia diprediksi akan menjadi 10 negara perekonomian terbesar pada 2030, bersama-sama dengan negara Tiongkok, India, Amerika Serikat. Prediksi tersebut tentunya dengan memperhatikan optimisme pertumbuhan negara dalam ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang dibangun oleh Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis multidimensi bagi dunia dan Indonesia, baik pada aspek kesehatan, perdagangan, pariwisata, energi, keuangan, serta ekonomi mikro Indonesia. Pada tahun 2019, sesuai dengan data BPS, tercatat pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sebesar 5,02 persen sementara pada 2020 setelah satu tahun pandemi pertumbuhan perekonomian Indonesia adalah sebesar minus 2,07 persen.

Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 menetapkan Lima Visi Pembangunan (Nawacita Jilid II) yang berisi (1) Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (3) Mengundang Investasi, (4) Reformasi Birokrasi, (5) Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia

¹ (<https://covid19.go.id/>).

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
Sebagai

upaya untuk menciptakan kesejahteraan dan menjaga masyarakat Indonesia dari krisis multidimensi akibat Pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain dengan melaksanakan Program Vaksinasi Nasional bagi masyarakat dengan total sasaran vaksin sebanyak 181.554.465 dilakukan secara bertahap dengan prioritas utama yakni tenaga kesehatan, TNI/Polri, ASN, jurnalis, dan pedagang (<https://covid19.go.id/>).

Secara umum, perkembangan Covid-19 di Indonesia semakin tinggi dan di setiap daerah juga meningkat walaupun sudah dilaksanakan pencegahan dan protokol kesehatan. Pemerintah telah membuat aturan dan ketentuan untuk melaksanakan kegiatan dengan dibatasi jumlahnya namun masyarakat tetap saja kurang disiplin, sehingga penyebaran virus corona tidak terhindarkan. Selain itu, kondisi masyarakat di wilayah perbatasan banyak yang merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat dari adanya pandemi Covid-19 tidak kunjung mereda, antara lain terlihat dengan perputaran uang yang terjadi sangat minim dan tentu saja berdampak perekonomian mikro dan tradisional mengalami penurunan drastis. Penurunan tingkat perekonomian masyarakat tentu saja akan berdampak pada berkurangnya kemandirian suatu daerah.

Terkait dengan perekonomian mikro di wilayah perbatasan hal tersebut sangatlah rawan dan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, karena distribusi vaksin, kebutuhan pokok dan obat-obatan yang sampai di wilayah perbatasan masih sangat terbatas, khususnya di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan Sarawak. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 yang secara administratif dibagi dalam lima wilayah administratif. Pada tahun 2019,

tercatat neraca perdagangan Kaltara adalah sebesar 1,007.38 juta dollar.² Sementara pada tahun 2020, satu tahun setelah Pandemi, tercatat neraca perdagangan provinsi Kaltara adalah sebesar 862.11 juta dollar. Dari data tersebut tercatat turun sebesar 14.4 persen.³

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membentuk Satuan Tugas Khusus untuk menangani Covid-19 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti di beberapa provinsi untuk mencegah mobilitas penduduk dari luar ke wilayah Indonesia. Berdasarkan temuan BNPB, langkah pembatasan ini merupakan bentuk pengendalian dari bertambahnya kasus Covid-19 di perbatasan yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia serta pelaku pelintas batas negara. Pembatasan perjalanan antar kedua negara juga tertuang dalam peraturan atau kebijakan kemigrasian terkait Pandemi Covid-19 seperti Peraturan Menhukham RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah RI berlaku sejak 2 April 2020, juga Permenhukham No 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat Kedatangan serta Pemberian Ijin Tinggal Keadaan Terpaksa.⁴ Pembatasan dan penutupan PLBN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.⁵

Jika tidak kunjung landainya kurva Covid-19 di Indonesia terjadi, maka bisa berdampak serius. Jika itu terjadi terus-menerus, maka kemungkinan besar penutupan perbatasan dalam jangka waktu panjang oleh negara tetangga akan dilakukan. Tentunya itu akan memukul perekonomian nasional, khususnya di daerah perbatasan. Jika ini yang terjadi, maka dipastikan

² "Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$), 2019", <https://kaltara.bps.go.id/indicator/8/229/3/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 10 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

³ "Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$), 2020", <https://kaltara.bps.go.id/indicator/8/229/2/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

⁴ Bagas Hidayat Putra. "Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia", <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>, diakses pada 14 April 2021 pukul 14.00 WIB.

⁵ "Kepala BNPB bentuk Satgas COVID-19 perbatasan Indonesia - Malaysia", <https://www.antaraneews.com/video/2048694/kepala-bnpb-bentuk-satgas-covid-19-perbatasan-indonesia-malaysia>, diakses pada 14 April 2021 pukul 13.47 WIB.

kehidupan warga di perbatasan akan semakin sulit. Krisis kebutuhan pokok yang berdampak secara sosial, ekonomi dan keamanan akan membayangi.

Perlu perubahan mendasar dalam tata kelola perbatasan Indonesia, terutama di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan Indonesia dengan Malaysia memiliki ciri tersendiri yaitu tingginya tingkat ketergantungan ekonomi warga Indonesia di perbatasan terhadap negeri jiran itu. Hampir semua kebutuhan pokok warga di perbatasan disuplai dari Malaysia. Kemudahan akses dan harga yang jauh lebih murah menjadi alasan utama warga membeli barang dari negara tetangga.

Di tengah pandemi Covid-19, ketergantungan yang tidakimbang di perbatasan Indonesia-Malaysia telah memunculkan kekhawatiran baru. Pemberlakuan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat (PKPD) oleh Malaysia di daerah perbatasan telah berdampak pada semakin sulitnya penduduk di perbatasan dalam memperoleh kebutuhan pokok. Selama ini, masyarakat Indonesia di perbatasan sangat mengandalkan aktivitas perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya kebijakan PKPD praktis membuat aktivitas sehari-hari masyarakat terhenti. Masalah menjadi semakin pelik mengingat belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 di Indonesia.

Penyakit Covid-19 telah membuat pemerintah untuk bergerak cepat, tanggap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial dalam masyarakat khususnya di wilayah perbatasan. Pandemi Covid-19 meningkatkan jumlah pengangguran Indonesia sebesar 9.7 juta orang sulit untuk dibayangkan bila terjadi pengangguran maka masalah sosial akan terus bermunculan.⁶

Masalah disparitas ekonomi di perbatasan bukannya tidak disadari oleh pemerintah. Tercatat, sejak era Presiden Joko Widodo, upaya membangun infrastruktur kawasan perbatasan telah dilipatgandakan, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, renovasi, dan revitalisasi Pos Lintas

⁶ "Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang", <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang>, diakses pada 14 April 2021 pukul 14.00 WIB.

Batas Negara (PLBN). Dalam kurun waktu 2014-2019, sekurangnya tujuh PLBN dibangun, tiga di antaranya berlokasi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pada 2019, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No.1/2019 yang berisi perintah pembangunan 11 PLBN, tujuh di antaranya berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Keinginan Presiden jelas, PLBN bukan hanya berfungsi sebagai pos perbatasan tetapi harus berperan sebagai penggerak ekonomi di kawasan perbatasan.

Namun demikian, keinginan Presiden tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Terdapat setidaknya tiga faktor yang menyebabkan pembangunan fisik tersebut belum memiliki efek yang signifikan terhadap perekonomian di kawasan perbatasan. Pertama, pembangunan fisik (*hardware*) seringkali tidak atau belum diikuti dengan kesiapan tata kelola (*software*) yang memadai, baik itu dari sisi kebijakan, regulasi, maupun sumber daya. Ambil contoh, keinginan Presiden untuk melipatgandakan ekspor melalui pintu perbatasan, di level teknis ambisi tersebut masih terbentur belum lengkapnya regulasi/tata niaga ekspor melalui perbatasan. Kedua, PLBN seringkali tidak berfungsi efektif karena belum idealnya atau bahkan tidak tersedianya partner bagi PLBN tersebut di sisi negara tetangga. Sebagai pintu perbatasan yang menghubungkan dua negara, keberadaan partner PLBN di sisi negara tetangga adalah keharusan. PLBN di Kabupaten Nunukan misalnya, hingga kini belum berfungsi efektif sebagai pintu ekspor, karena partnernya di sisi Malaysia belum tersedia ideal. Ketiga, ketiadaan fasilitas pendukung ekspor seperti pelabuhan darat (*inland port*) di pintu perbatasan juga turut berkontribusi menghambat rencana ekspor melalui perbatasan. Padahal, jika Pemerintah serius hendak mengembangkan perdagangan perbatasan dalam skala besar (ekspor-impor), maka pembangunan fasilitas pendukung seperti pelabuhan darat adalah hal yang tidak dapat dihindarkan.

Menyikapi potensi keadaan yang semakin sulit di perbatasan tersebut, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan terukur. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu berkomunikasi dengan Malaysia untuk setidaknya mau melonggarkan kebijakan *lockdown* di perbatasan. Hal ini tidak mudah, selain karena menyangkut kedaulatan negara tetangga juga karena fakta bahwa laju Covid-19 di Indonesia belum juga melandai. Namun,

kemampuan diplomasi Indonesia yang sejauh ini cukup teruji di tengah wabah Covid-19 perlu diberi kesempatan mengambil langkah tersebut. Selanjutnya, dalam hal pembangunan fisik yang bertujuan meningkatkan ekspor di perbatasan, pemerintah ke depan perlu memastikan terlebih dahulu ketersediaan partner bagi infrastruktur yang sedang dibangun tersebut di sisi negara tetangga. Tidak boleh lagi terjadi misalnya, PLBN (Polisi Lintas Batas Negara) di Indonesia yang tidak dapat berfungsi (optimal) akibat ketiadaan partner di sisi negara tetangga. Di luar pembangunan fisik, pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola perdagangan perbatasan. Ide Presiden untuk meningkatkan ekspor melalui **pintu perbatasan** harus diikuti dengan kesiapan tata niaga perdagangan perbatasan yang memadai. Pemerintah perlu memperbaiki sistem *supply chain* kebutuhan pokok di perbatasan. Tidak bisa lagi warga perbatasan diminta bergantung kepada negara tetangga Pusat-pusat logistik nasional harus dibangun di sepanjang perbatasan. Kalaupun untuk sementara pusat logistik itu harus diisi dengan barang-barang dari Malaysia, pemerintah perlu melakukan intervensi baik itu dari sisi harga, ketersediaan, maupun akses. Bila pandemi tidak kunjung mereda secara tidak langsung dampak yang terjadi adalah Pemerintah akan memperpanjang masa PPKM dengan sebutan *Lockdown* Mikro yaitu Pembatasan kegiatan – kegiatan/ yang mengumpulkan massa pada tingkat desa maupun tingkat RT dan bila ini terjadi maka kegiatan pasar / transaksi jual beli akan mengalami penurunan dengan kata lain **daya beli masyarakat akan menurun** juga akibat dari adanya kebijakan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah **“Bagaimana Meningkatkan Kemandirian Ekonomi di Wilayah Perbatasan Guna Meningkatkan Nasionalisme?”**. Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi ketahanan perekonomian di wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan NKRI. Adapun pokok – pokok masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan masyarakat menurun
- b. Pengangguran meningkat
- c. Daya beli masyarakat rendah

Dari rumusan masalah di atas, maka muncul pertanyaan kajian yang diangkat dalam karya taskap ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa perekonomian masyarakat perbatasan masih tergantung dari negara tetangga dalam hal ini negara Malaysia?
- b. Bagaimana mengatasi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan?
- c. Apakah krisis ekonomi di perbatasan dapat mempengaruhi lemahnya rasa nasionalisme masyarakat?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran dan analisis kondisi permasalahan perekonomian mikro di masyarakat perbatasan guna meningkatkan kemandirian perekonomian di wilayah perbatasan untuk meningkatkan nasionalisme di wilayah tersebut.
- b. **Tujuan.** Tujuan dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan perekonomian mikro di masyarakat perbatasan guna meningkatkan kemandirian perekonomian di wilayah perbatasan untuk meningkatkan nasionalisme di wilayah tersebut.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam karya taskap perorangan ini dibatasi pada bagaimana meningkatkan kemandirian ekonomi di wilayah perbatasan guna meningkatkan nasionalisme khususnya permasalahan perekonomian mikro masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara.

b. Sistematika

- 1) **BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud, dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi agar tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran.

- 2) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Berisi uraian singkat mengenai kondisi perekonomian di wilayah perbatasan, landasan teoritis, data dan fakta, serta pengaruh lingkungan strategis sebagai tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan persoalan terkait dengan peningkatan kemandirian ekonomi di wilayah perbatasan guna meningkatkan nasionalisme.
- 3) **BAB III PEMBAHASAN.** Berisi uraian tentang analisis pokok-pokok bahasan dengan menggunakan data/info/aspek dan teori yang ada pada Tinjauan Pustaka, sehingga dari analisis tersebut didapatkan solusi pemecahan masalah secara komprehensif, holistik dan integral. Selanjutnya disimpulkan dalam bentuk hasil analisis berisi ringkasan dari pemecahan pokok-pokok bahasan, sehingga menggambarkan solusi secara ilmiah, logis, obyektif, dan kontekstual.
- 4) **BAB IV PENUTUP.** Berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. Metode Pendekatan

- a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Kertas Karya Perorangan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis deskriptif untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat hubungan antar variabel-variabel yang ada, dengan analisis studi kepustakaan serta data dari lapangan yakni fakta empiris. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis dan disajikan secara deskriptif dalam bentuk naratif.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif Ketahanan Nasional dengan menggunakan pisau analisis studi kepustakaan dan pengalaman penugasan Penulis dalam konsep analisis multi disiplin ilmu sesuai dengan landasan teori yang digunakan maupun dari bahan referensi lainnya yang relevan. Dengan pendekatan ini, maka pembahasan masalah dan pemecahannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dari berbagai aspek terkait di wilayah perbatasan.

6. Pengertian

- a. **Nasionalisme.** Kata “nasionalisme” berasal dari kata “*natio*” dari bahasa latin, bermakna sebagai bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata “*natio*” berasal dari kata “*nascie*” yang berarti dilahirkan. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Paham tersebut mulai muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk membangun suatu negara.⁷
- b. **Konsep Perbatasan.** Perbatasan dapat diartikan sebagai suatu unit legal-politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu negara. Dalam konteks semacam ini, menurut Jean-Marc F. Blanchard perbatasan memiliki fungsi militer-strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara dan kepentingan domestik.⁸ Bagi negara berdaulat, perbatasan setidaknya memiliki tujuh macam fungsi yaitu Fungsi Militer Strategis, Fungsi Ekonomis, Fungsi Konstitutif, Fungsi Identitas Nasional, Fungsi Persatuan Nasional, Fungsi Perbatasan Negara-Bangsa, dan Fungsi Pencapaian Kepentingan Domestik.⁹
- c. **Ekonomi Mikro.** Pengertian “mikro” dan “makro” maupun “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata *oikon* dan *nomos* yang berarti rumah tangga dan kaidah atau aturan sehingga ekonomi secara harfiah dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan mengenai rumah tangga. Ilmu ekonomi mikro yang berarti ilmu ekonomi yang mempelajari satuan yang kecil (mikro artinya kecil), sementara ilmu ekonomi makro mempelajari satuan yang besar atau satuan agregat.¹⁰ Ilmu ekonomi mikro berusaha melihat melalui “mikroskop”, perilaku individu atau rumah tangga sebagai konsumen dan individu atau perusahaan sebagai produsen saling bekerja dan

⁷ Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1985, hlm. 11.

⁸ Jean-Marc Hans Kohn, *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1985, hlm. 11. F Blanchard. “Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory”, dalam *Geopolitics*, No.10, 2005, hlm. 691.

⁹Joao Muni. *Aspek-Aspek Desentralisasi Teori dan Aplikasi State Border Governance Timor Leste-Indonesia*, Penerbit Qiara Media, Cetakan Pertama 2019, hlm. 235-238.

¹⁰ *Ibid.*

saling berinteraksi dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka masing-masing. Ilmu ekonomi mikro memberikan alat dan pengertian untuk memahami realitas yang sebenarnya sangat rumit dan ruwet melalui model yang relatif lebih sederhana.¹¹

- d. Kemandirian Ekonomi.** Pengertian kemandirian adalah kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh anak bangsanya sendiri yang dihasilkan oleh strategi pembangunan ekonomi di mana negara mengutamakan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan asing. Kemandirian haruslah berujung pada akumulasi devisa yang makin besar dan kuat sehingga menghasilkan kemandirian finansial dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.¹²
- e. Pos Lintas Batas Negara (PLBN).** Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan. Mengutip dari Wikipedia, otorisasi seringkali dibutuhkan untuk memasuki sebuah negara melalui perbatasannya. Pemeriksaan di pos lintas batas negara umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mencegah masuknya individu yang tidak diinginkan (misalnya penjahat atau orang yang dapat menimbulkan ancaman) atau hanya tidak diizinkan untuk masuk, dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang ilegal, atau pembatasan barang masuk, atau untuk mendapatkan bea masuk.
- f. Krisis Multidimensi.** adalah keadaan berbahaya, parah sekali, keadaan suram (tentang ekonomi, moral, dan sebagainya). Krisis ekonomi berarti kemerosotan dalam kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan depresi. Krisis multidimensi dapat diartikan sebagai situasi keadaan berbahaya yang mencakup berbagai dimensi dan kemungkinan. (kbbi.kemdikbud.go.id)

¹¹ Sigit Sardjono. *Ekonomi Mikro - Teori dan Aplikasi*. Penerbit: Andi, 2019, hlm. 54.

¹² Didin S Damanhuri. "Kemandirian Ekonomi: Strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional atas asing", <https://www.republika.id/posts/7494/kemandirian-ekonomi>, diakses pada 14 April 2021 pukul 15.13 WIB.

- g. **Supply Chain** atau **rantai pasok**. adalah semua produsen dan pemasok dalam proses manufaktur. Mengutip dari Wikipedia, urutan proses yang terlibat dalam produksi dan distribusi komoditas yang merupakan sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan. Badan usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada umumnya terdiri dari manufaktur, penyedia layanan jasa, distributor, dan saluran penjualan (seperti: pedagang eceran, *e-commerce*, dan pelanggan (pengguna akhir). (Kbbi.kemdikbud.go.id)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya sangat strategis, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Gugusan kepulauan yang ada di Indonesia disatukan oleh lautan yang terhampar luas dan beberapa di antaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, baik darat maupun laut. Selama setahun Indonesia dilanda oleh Pandemi Covid-19 berdampak pada krisis multidimensi di berbagai daerah, termasuk di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan mengandalkan perekonomian mereka pada sektor non formal dan perekonomian mikro serta perdagangan pada lintas batas negara. Tercatat rencana perdagangan di provinsi Kalimantan Utara turun sebesar 14,4 persen. Berdasarkan temuan BNPB, kasus Covid-19 terdapat adanya peningkatan di wilayah perbatasan yang disebabkan oleh Pekerja Migran Indonesia serta pelaku pelintas batas negara. Negara tetangga Malaysia telah memberlakukan Perintah Kawan Pergerakan Diperketat (PKPD) yang berdampak pada terhentinya perekonomian masyarakat.

8. Landasan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)

a. Pancasila Sila ke-5. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia sebagai lima prinsip atau lima asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penerapan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, maka sudah sewajarnya rakyat Indonesia mengamalkan kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menggali lebih banyak lagi isi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, maka dijabarkanlah menjadi butir-butir pengamalan dari setiap sila. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia sebagai lima prinsip atau lima asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penerapan sila ke-5 dalam kehidupan sehari-hari yang berbunyi: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memiliki butir-butir

pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dan sudah diperbaharui setelah Reformasi dengan Ketetapan MPR No. I/MPR/2003.

- b. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945.** Dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan (tahun 2002), Bab XIV berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional dan Pasal 34 lebih menekankan Kesejahteraan Sosial. Meskipun mengesankan pandangan peran perekonomian yang lebih besar, semangat kebersamaan dan asas kekeluargaan tetap menjadi ciri perekonomian Indonesia. Sementara perubahan Pasal 34 yang sangat bermakna adalah dicantumkannya cita-cita untuk mengembangkan sistem jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".

9. Landasan Teoretis

a. Teori Kebijakan Publik

Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep *public policy* dalam ilmu administrasi publik.¹³ Teori dan proses kebijakan publik memiliki definisi yang tidak hanya menekankan pada hal-hal yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perhatian para ilmuwan politik terhadap studi kebijakan publik juga semakin besar.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan, "*Public policy is a proposed course of action of person, group or government within a given environment providing obstacle and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*", dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan

¹³ Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. Penerbit: Pustaka Setia Bandung, 2014, hlm. 13-14.

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”¹⁴

Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu hukum. Akan tetapi, tidak hanya hukum, tetapi juga harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, seperti menjadi undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.¹⁵

b. Teori Ekonomi

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.¹⁶ Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan. Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dari sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia berulang kali hendak dihapuskan oleh beberapa tokoh ekonomi yang menduduki jabatan legislatif. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “Sistem Ekonomi Campuran”,

¹⁴ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 7

¹⁵ *Anggara, Loc. Cit.*

¹⁶ H. A. Rusdiana. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*, Pustaka Setia: Bandung, 2018, hlm 21-27.

maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga”.¹⁷

Pandangan mengenai Ekonomi Pancasila begitu beragam, namun bila merujuk pada pemikiran Mubyarto, pada dasarnya Ekonomi Pancasila memiliki lima ciri: (1) roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; (2) kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai asas-asas kemanusiaan; (3) prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; (4) koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama dan (5) adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.¹⁸

10. Data dan Fakta

Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas $\pm 75.467.70 \text{ km}^2$, terletak pada posisi antara $114^{\circ} 35' 22''$ - $118^{\circ} 03' 00''$ Bujur Timur dan antara $1^{\circ} 21' 36''$ - $4^{\circ} 24' 55''$ Lintang Utara. Selain itu berdasarkan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara diketahui memiliki luas lautan seluas 11.579 km^2 (13% dari luas wilayah total).

Tabel 1 Batas Wilayah Kalimantan Utara

Batasan	Negara
Sebelah Utara	Negara Sabah (Malaysia)
Sebelah Timur	Laut Sulawesi
Sebelah Selatan	Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Barat	Negara Serawak (Malaysia)

Berdasarkan data dari BPS dalam Kaltara Dalam Angka 2020, disebutkan bahwa berdasarkan data Statistik Kunci 2017 – 2019 dalam aspek

¹⁷ Dawam Rahardjo. “Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu”, <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu>, diakses pada 19 April 2021 pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Mubyarto. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 32

ekonomi, terdapat peningkatan perekonomian yang sangat signifikan dengan laju pertumbuhan 6,8 persen pada tahun 2017, 6,05 persen pada tahun 2018, dan 6,91 persen pada tahun 2019.¹⁹ Secara kependudukan, status pekerjaan penduduk provinsi Kaltara didominasi oleh pekerja yang berusaha sendiri (64.999) dan Buruh/Karyawan/Pegawai (164.442).

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015–2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pada kondisi September 2019, garis kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp 699.082,00 dan Rp 623.915,00 di wilayah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara kondisi September 2019 mencapai 48,61 ribu penduduk (6,49 persen), terdiri dari 22,06 ribu penduduk miskin di wilayah perkotaan (4,86 persen) dan 26,55 ribu penduduk miskin di wilayah perdesaan (9,00 persen). Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara kondisi September 2019 adalah 0,77 (perkotaan), 1,66 (perdesaan), dan 1,12 (perkotaan dan perdesaan).

Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada September 2019 adalah 0,17 (perkotaan), 0,43 (perdesaan), dan 0,27 (perkotaan dan perdesaan). Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014 – 2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Provinsi Kalimantan Utara mencapai 71,15. Terjadi peningkatan 0,59 poin jika dibandingkan dengan IPM pada tahun 2018 (70,56 tahun 2018 menjadi 71,15 tahun 2019). Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 adalah IPM Kota Tarakan yang mencapai 76,09. Lalu peringkat kedua dan ketiga masing-masing adalah IPM Kabupaten Malinau (72,06) dan IPM Kabupaten Bulungan (71,66).²⁰

Melalui data Produk Domestik Bruto Regional Bruto Provinsi, terdapat lapangan usaha industri penduduk Kalimantan Utara di tahun 2019, sebagai berikut:

¹⁹ "Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$), 2020", <https://kaltara.bps.go.id/indicator/8/229/2/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. *Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2020*, hlm. 165-167.

Tabel 2 Produk Domestik Bruto Regional Provinsi Kalimantan Utara 2019

No	Lapangan Usaha/Industri	Besaran (dalam miliar rupiah)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.473,52
2.	Pertambangan dan Pengalihan	26.259,90
3.	Industri Pengolahan	8.961,29
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	50,8
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	56,74
6.	Konstruksi	13.389,50
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.698,25
8.	Transportasi dan Pergudangan	6.871,59
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.574,48
10.	Informasi dan Komunikasi	2.262,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.065,04
12.	Real Estate	746,03
13.	Jasa Perusahaan	213,95
14.	Admisitrasi Pemerintahan, pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.828,88
15.	Jasa pendidikan	2.380,29
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	988,71
17.	Jasa Lainnya	636,61

Badan kesehatan dunia (WHO) mencatat penyakit dari Virus Covid-19 terus menyebar dan hingga 19 Oktober 2020, kasus konfirmasi Covid-19 mendekati 40 juta secara global dengan 1.11 juta orang meninggal dunia. Tak seorang pun menyangka persoalan kesehatan ini merembet ke krisis sosial dan ekonomi. Sejumlah negara yang dulu membuka pintu baik perdagangan maupun lalu lintas manusia, kemudian saling menutup diri.²¹

Untuk mengatasi kasus Covid-19, Pemprov Kaltara melakukan penyesuaian atau refocusing anggaran di Tahun 2021 sekitar Rp 111 miliar

²¹ "Corona dan ekonomi dunia yang merana", <https://www.antaraneews.com/berita/1793745/corona-dan-ekonomi-dunia-yang-merana>, diakses pada 19 April 2021 pukul 12.00 WIB.

disiapkan untuk berbagai program penanggulangan Covid-19. Dana refocusing anggaran akan menysasar pada tiga bidang, yakni di bidang kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Di dalamnya juga terdapat program untuk insentif tenaga pendidik, dan BPJS. Refocusing anggaran juga dialokasikan untuk penambahan anggaran Penerima Bantuan luran atau PBI BPJS Kesehatan. Bantuan keuangan untuk insentif tenaga pendidik tutor Paud, TK, SD, SMP, totalnya 13.026 orang menjadi Rp 550.000 per orang, selain itu penambahan dana BPJS menjadi total hingga Rp 20 miliar.²² Selain itu, guna meningkatkan tes skrining untuk mendeteksi Covid-19, pihak Dinas Kesehatan Kaltara mengaku akan memesan enam unit GeNose C19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kaltara hingga kini pengadaan alat skrining GeNose masih menunggu alokasi anggaran di Dinkes. Di mana nantinya akan diadakan enam unit GeNose C19, beserta bahan habis pakai berupa 8.500 kantong tiup.²³

Pada pertengahan April 2021 tercatat 18 juta penduduk India positif Covid-19. India mengalami lonjakan kasus dan disebut sebagai Tsunami Covid karena per hari jumlah orang terjangkit mencapai 300-ribuan orang, para petugas medis kewalahan, dan banyak orang yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan seperti oksigen dan tempat tidur. Hal ini disebabkan oleh abainya masyarakat pada protokol kesehatan dengan mengikuti upacara keagamaan usai divaksin. Menyikapi hal tersebut dan sebagai upaya preventif jelang Hari Raya Idul Fitri di Indonesia pada pertengahan Mei 2021, Satgas Penanganan Covid-19 membuat Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang menegaskan pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 mudik ditiadakan. Juga dikeluarkan aturan larangan berangkat keluar Kalimantan Utara, baik via darat, laut dan udara. Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa peniadaan mudik yang diberlakukan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang dan berlaku bagi pelaku perjalanan yang ingin keluar Provinsi

²² "Penyesuaian Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19, Pemprov Kaltara Siapkan Rp 111 M", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/20/penyesuaian-anggaran-untuk-penanggulangan-covid-19-pemprov-kaltara-siapkan-rp-111-m?page=2>, diakses pada 18.30 WIB

²³ "Dinkes Kaltara Pesan Enam Unit GeNose C19 dan 8.500 Kantong Tiup, Alokasikan Rp 70 Juta per Unit", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/22/dinkes-kaltara-pesan-enam-unit-genose-c19-dan-8500-kantong-tiup-alokasikan-rp-70-juta-per-unit?page=2>, diakses pada 18.00 WIB.

Kaltara.²⁴ Meskipun hari ini wilayah Kaltara masuk wilayah zona sedang atau oranye, pihaknya berharap agar semua pihak tidak lalai dalam menjalankan protokol kesehatan. Provinsi Kaltara memberlakukan PPKM Mikro Jilid kedua sepanjang dua minggu yang dimulai dari 20 April hingga 6 Mei 2021. Penerapan PPKM Mikro tidak terlepas dari kondisi pandemi Covid-19 di Kaltara yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Gubernur Kaltara menginstruksikan bupati dan walikota untuk melakukan pengetatan di wilayah masing-masing sebagai upaya untuk pengetatan di lingkup terkecil di desa.²⁵

11. Pengaruh Lingkungan Strategis

a. Internasional

1) Global

Lima negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia yaitu Amerika Serikat (total kasus 32,9 juta), India (total kasus 18,3 juta), Brazil (total kasus 14,5 juta), Perancis (total kasus 4,7 juta), Rusia (total kasus 4,7 juta). Pandemi Covid-19 semakin cepat sehingga akses yang adil terhadap distribusi vaksin dan tindakan pencegahan yang efektif sangat penting untuk membantu membalikkan keadaan. Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh dunia adalah penularan virus ini dengan tingkat mutasi dan penyebaran yang sangat cepat.

AS memandang bahwa cara mengatasi pandemi ini dengan kombinasi akses vaksin yang cepat dan merata, serta langkah-langkah pencegahan yang efektif. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), pada Rabu (28/4/2021), Amerika Serikat telah memberikan 234.639.414 dosis vaksin corona dan mendistribusikan 301.857.885 dosis. Di sisi lain, dunia juga bergotong royong untuk menolong negara-negara lain dalam menangani kasus Covid-19.

²⁴ "Keluar Masuk Tarakan Kalimantan Utara via Speedboat Masih Diperbolehkan, Larangan Mudik Lebaran 2021", <https://borneo24.com/seputar-borneo/kalimantan-utara/keluar-masuk-tarakan-kalimantan-utara-via-speedboat-masih-diperbolehkan-larangan-mudik-lebaran-2021>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 17.00 WIB.

²⁵ "PPKM Mikro Kembali Berlaku di Kalimantan Utara, Wagub Kaltara Yansen Sebut Bukan Pengekangan", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/30/ppkm-mikro-kembali-berlaku-di-kalimantan-utara-wagub-kaltara-yansen-sebut-bukan-engekangan>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.

Amerika Serikat dan Inggris segera mengirimkan bantuan ventilator dan bahan vaksin ke India yang tengah memerangi gelombang kedua pandemi Covid-19 yang tidak terkendali. Perancis, Jerman, dan Kanada juga telah menjanjikan dukungan kepada India. Pemerintah India menghadapi kritik yang meningkat karena mengizinkan pertemuan massal di seluruh negeri dalam beberapa pekan terakhir. Jutaan orang juga diketahui menghadiri festival keagamaan dan demonstrasi politik yang menimbulkan kerumunan massa. Liga Premier India juga berada di bawah tekanan, setelah surat kabar terkemuka menengguhkan liputan atas keputusan IPL untuk tetap bermain kriket selama gelombang terbaru.²⁶

2) Regional

Indonesia dan Filipina menjadi dua negara dengan jumlah kasus Covid-19 tertinggi di ASEAN. Filipina telah menembus angka satu juta kasus Covid-19 pada Senin, 26 April 2021, lalu ketika jumlah kasus baru per hari hampir menyentuh 9.000. Filipina telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 1.013.618. Filipina dan Indonesia menjadi negara terkini yang menembus angka satu juta kasus dan berada di urutan 26 negara penyumbang jumlah kasus Covid-19 terbesar di dunia. Filipina melonggarkan pengetatan di negara tersebut untuk menjaga perekonomian tak terus merosot. Diperkirakan, selama dua minggu pertama *lockdown* di Manila telah menciptakan sekitar 252 ribu pengangguran baru dan membuat potensi pendapatan senilai hampir 30 miliar Peso. Seperti diketahui, negara itu pernah berkejaran sebelum jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia melesat menjauh.²⁷

Sementara itu, Singapura telah melaporkan lebih dari 61.000 kasus Covid-19 sejak pandemi melanda tahun lalu, dimana sebagian

²⁶ "Update Corona India: AS dan Inggris Kirim Ventilator dan Bahan Vaksin", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/26/163000165/update-corona-india--as-dan-inggris-kirim-ventilator-dan-bahan-vaksin?page=2>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

²⁷ "Covid-19 Global, Filipina Negara ASEAN Kedua Tembus Sejuta Kasus", <https://tekno.tempo.co/read/1457365/covid-19-global-filipina-negara-asean-kedua-tembus-sejuta-kasus/full&view=ok>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

besar kasus ditemukan di asrama-asrama yang menampung para pekerja asing berupah rendah. Negara Singapura telah mencatat total 30 kematian akibat infeksi virus Corona baru.²⁸ Di Thailand, Kementerian Kesehatan negara tersebut melaporkan terdapat 1.891 kasus baru dalam gelombang infeksi ketiga yang sengit setelah setahun relatif berhasil dalam mengendalikan virus. Jumlah total infeksi di Thailand adalah 67.044 sejak pandemi dimulai tahun lalu, dengan total 224 kematian.²⁹ Sementara itu Gelombang ketiga Covid-19 di Malaysia juga semakin mengganas. Pasien positif corona di negeri jiran tersebut bertambah 6.075 atau rekor tertinggi selama pandemi melanda. Dengan lonjakan pasien baru, maka total kasus Covid-19 di Malaysia mencapai 485.496 orang.³⁰

b. Nasional

- 1) **Geografi.** Indonesia adalah negara kepulauan atau berbatasan dengan banyak laut. Secara geografi, posisi wilayah Indonesia berada di persilangan strategis antara dua benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, dilalui oleh jalur pegunungan aktif dunia yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat strategis baik menjadi tujuan bagi penduduk dari berbagai belahan dunia maupun transit/persinggahan menuju ke negara tetangga Indonesia (Australia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan lainnya). Hal ini di satu sisi menguntungkan Indonesia, akan tetapi menjadi potensi tingginya penyebaran Covid-19 karena tingginya mobilitas manusia dan barang di Indonesia. Tercatat sebanyak 92 pulau merupakan pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua

²⁸ "Singapura temukan kluster COVID di rumah sakit saat kasus lokal naik", <https://www.antaraneews.com/berita/2130982/singapura-temukan-kluster-covid-di-rumah-sakit-saat-kasus-lokal-naik>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

²⁹ "Thailand catat rekor harian baru 21 kematian dalam gelombang III COVID", <https://www.antaraneews.com/berita/2132590/thailand-catat-rekor-harian-baru-21-kematian-dalam-gelombang-iii-covid>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

³⁰ "Gelombang Ketiga Covid-19, Malaysia Catat Rekor 6.075 Kasus Baru", <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60a5d6e99ec5b/gelombang-ketiga-covid-19-malaysia-catat-rekor-6075-kasus-baru> diakses pada 21 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

New Guinea, dan Australia (Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005) dan beberapa di antaranya mempunyai beragam persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Dengan kondisi geografis tersebut, Indonesia seharusnya mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar, terlebih wilayah yang sarat akan potensi sumber daya alam yang jika dimanfaatkan dengan optimal dapat memperkuat ketahanan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan sosial dan disintegrasi bangsa.

2) Demografi. Jumlah penduduk Indonesia yang besar jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, maka penduduk Indonesia merupakan sumber daya yang potensial yang dapat diberdayakan, termasuk dalam menghadapi sebagai potensi bonus demografi untuk mendukung majunya perekonomian nasional. Akan tetapi, dengan tingginya jumlah penduduk Indonesia yaitu sebagai negara dengan penduduk terbanyak di Asia Negara dan dengan kepadatan yang tinggi di wilayah perkotaan meningkatkan potensi dan penyebaran Covid-19 semakin cepat. Dari sisi demografi pengaruh jumlah penduduk yang besar menjadi tantangan bagi aspek kesehatan, terutama dengan terbatasnya tenaga kesehatan dan pendukung medis. Di sisi lain, akibat pandemi Covid-19 banyak pekerja yang menganggur. Demografi Indonesia selain menjadi peluang bagi kemajuan perekonomian Indonesia juga menjadi bagi tantangan dan hambatan bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia diberkahi dengan potensi alam yang sangat kaya, baik di daratan maupun di lautan. Pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam Indonesia masih menjadi sumber perekonomian Indonesia. Akan tetapi dalam jaringan global, Indonesia membutuhkan kerjasama dengan berbagai negara di dunia sebagai rantai pasok global. Akibat adanya pandemi Covid-19, berbagai kegiatan perekonomian sebagai pemanfaatan SKA

Indonesia terhenti, hal ini berdampak pada menurunnya perekonomian Indonesia baik pada sektor ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Selain itu, akibat adanya penebangan liar, pemanasan global dan perubahan iklim membuat menurunnya kondisi alam Indonesia. Kondisi ini akan menjadi kendala dalam mendukung program ketahanan ekonomi nasional. Namun faktor sumber kekayaan alam dan jumlah penduduk menjadikan peluang dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam dalam memberikan bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional.

4) Ideologi. Pengembangan nilai-nilai kebhinnekaan dan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila dimaksudkan untuk mencegah munculnya ego kedaerahan dan memperkuat nasionalisme. Berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional di perbatasan pada sektor ekobomi mikro, pengembangan dan pengamalan Pancasila akan menjadi peluang bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama mengupayakan ketahanan ekonomi secara nasional, dengan memperjuangkan swasembada pangan. Pengaruh lunturnya implementasi nilai Pancasila menjadi kendala karena membuat banyak pemangku kebijakan dan juga masyarakat kurang menyadari begitu banyak potensi dan sumber kekayaan alam yang bisa dioptimalkan di dalam negeri yang semestinya menjadi atensi yang diprioritaskan dalam mempertahankan ketahanan ekonomi nasional.

5) Politik. Kondisi perpolitikan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan ditinjau dari infrastruktur politik, suprastruktural politik, dan budaya politik. Pada tataran infrasktruktur politik nasional, perpolitikan nasional diwarnai oleh masih lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akibat masih tingginya kasus korupsi (Korupsi Dana Bansos) maupun konflik politik antar kelompok. Pemerintah terus mengupayakan penanganan Covid-19 agar tidak berdampak meluas, akan tetapi Covid-19 telah berpengaruh terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat, selain itu penerimaan

negara akibat adanya pandemi Covid-19 terus menurun. Di sisi lain, terdapat penyebaran berita bohong oleh oknum ataupun tokoh publik yang masif di media sosial. Hal ini tentu saja memperberat usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air.

- 6) **Ekonomi.** Sektor perekonomian di Indonesia menjadi salah satu sektor yang paling terpukul akibat Covid-19. Hal tersebut tergambar dari rendahnya penerimaan pajak negara, matinya industri besar maupun kecil, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Sektor Perekonomian sektor mikro memiliki andil besar bagi perekonomian nasional namun dengan adanya Covid-19 memberikan dampak terpuruknya sektor ekonomi menjadikan kendala masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehingga perlu terus dioptimalkan.
- 7) **Sosial Budaya.** Pemahaman generasi penerus bangsa terkait dengan nilai-nilai yang terkandung Empat Pilar Kebangsaan yang ada pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, semakin terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.
- 8) **Pertahanan dan Keamanan.** Upaya pemerintah dalam melaksanakan ketahanan dalam aspek pertahanan keamanan selama pandemi Covid-19 mengalami kendala dengan masih terbatasnya alutsista dan kekuatan infrastruktur pertahanan dan keamanan di perbatasan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga cukup kewalahan dalam menangani tingginya jumlah -penderita Covid-19, tingginya biaya perawatan, terbatasnya tenaga kesehatan. Sebagai upaya membantu tenaga medis, pemerintah juga menurunkan aparat keamanan (TNI dan Polri) yang membantu penanganan pandemi Covid-19.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Wilayah perbatasan memegang peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dari sisi teritori, wilayah perbatasan merupakan perwujudan yang nyata dari kedaulatan suatu negara (Moeldoko, 2013). Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap ketahanan sebuah bangsa. Akan tetapi meskipun telah disadari akan posisi strategis dan pentingnya wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan negara, secara umum perekonomian dan pembangunan wilayah perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah pusat dan perkotaan. Hal ini terlihat dari sarana dan prasarana sosial ekonomi di wilayah perbatasan ekonomi di wilayah tersebut masih sangat terbatas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004). Kondisi tersebut tentu saja diperburuk dengan kondisi Pandemi Covid-19 dimana pandemi tersebut membawa pada krisis multidimensional di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Wilayah perbatasan secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/ atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.³¹

Provinsi Kalimantan Utara atau biasa disingkat Kaltara ini berada di timur Pulau Kalimantan. Kalimantan Utara termasuk termuda atau provinsi ke-34 di Indonesia. Provinsi ini secara resmi dibentuk pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kotanya berada di Tanjung

³¹ Subagiyo Hasyim. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 5.

Selor, Kabupaten Bulungan. Sebelum ditetapkan menjadi provinsi, Kalimantan Utara masih menyatu dengan Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Provinsi yang memiliki motto “Benuanta” yang berarti optimis ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Luas Kaltara sekitar 7,5 juta hektare, hampir seluas Jawa Tengah ditambah Jawa Timur dengan jumlah penduduk 742.245 jiwa pada 2019.³²

13. Ketergantungan Masyarakat Wilayah Perbatasan terhadap Negara Tetangga

Permasalahan yang mengemuka dari wilayah perbatasan antara lain adalah masih lemahnya kemandirian ekonomi. Dalam perspektif kebijakan publik, menurut Carl J Federick (1942), kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan adanya kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan adalah tindakan kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.³³

Terkait dengan kebijakan masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Utara yang menyebabkan ketergantungan, terdapat kelemahan dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perdagangan perbatasan yakni tindakan tegas terhadap pelanggar kesepakatan *Border Trade Agreement (BTA)*, masih belum terfasilitasinya kebijakan kebutuhan komunikasi yang memungkinkan keterhubungan antara wilayah di Kalimantan Utara serta dengan pusat, belum terfasilitasi dan didukungnya aspek

³² Antonius Purwanto. "Provinsi Kalimantan Utara", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-utara>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 18.30 WIB.

³³ Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung. 2006. Hlm 7.

kesejahteraan masyarakat perbatasan yakni kesehatan dan pendidikan, serta dalam hal aspek ekonomi masih minimnya dukungan fasilitas ekonomi di aspek produksi, distribusi, dan akses konsumen ke hasil perdagangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pemerintah Pusat juga masih perlu meningkatkan perhatiannya terhadap pembangunan dukungan fasilitas infrastruktur di wilayah perbatasan.

Dalam penyusunan kebijakan publik, terdapat salah satu tahapan menyusun kebijakan publik yakni tahapan formulasi kebijakan. Dalam tahap formulasi kebijakan, masalah yang menjadi agenda utama oleh para pembuat kebijakan didefinisikan dan dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dilihat sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Terkait dengan permasalahan yang ada di Kalimantan Utara, para pembuat kebijakan publik (aktor) perlu memperhatikan aspek Ketahanan Nasional yang mencakup berbagai sendi kehidupan saat merumuskan permasalahan yang ada. Tiap pimpinan daerah yang terpilih meskipun memiliki agenda tertentu, akan tetapi agenda, pemilihan permasalahan, dan penemuan solusi alternatif tersebut harus didasarkan pada kewajiban negara dalam memakmurkan warga negaranya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun secara detail, penyebab ketergantungan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesejarahan, aspek ekonomi, serta aspek fisik dan infrastruktur.

a) Aspek kesejarahan.

Wilayah propinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu. Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) merupakan negara bagian Kesultanan

Banjar ketika masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu). Sampai tahun 1850, negeri Bulungan menjadi negeri bawahan Kesultanan Sulu (bekas bawahan Brunei). Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau. Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda. Pada masa kemerdekaan para tokoh pergerakan menyukkseskan integrasi Kesultanan Bulungan sebagai bagian dari NKRI pada 17 Agustus 1949 yang dibuktikan dengan adanya tugu di Tanjung Palas. Kesultanan Bulungan memutuskan berpihak kepada RI sebab sikap kesewenang-wenangan Belanda dalam setiap pengambilan kebijakan lebih banyak merugikan Kesultanan Bulungan. Kemudian pada tahun 1950 keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor C.17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan Swapraja Bulungan, Kutai dan Berau.³⁴

Berdasarkan aspek kesejarahan, penentuan batas wilayah negara Indonesia dengan Malaysia dilakukan berdasarkan bukti-bukti peninggalan kolonial yaitu berupa konvensi bersama antara Inggris sebagai penguasa Borneo dan Belanda yang menguasai Kalimantan, dalam melakukan persetujuan mengenai batas wilayah darat masing-masing.³⁵ Rangkaian sejarah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan sebelum kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan argumntasi historis yang memperkuat alokasi wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, sehingga hal ini bermanfaat bagi penetapan proses delimitasi dan demarkrasi perbatasan Indonesia.³⁶

³⁴ Ida Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985), hlm. 114

³⁵ Dewa Gede Sudika Mangku. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha, Jawa tengah, 2020. Hal: 86-89. Berdasarkan prinsip *Uti Possdetis Juris* yang merupakan sumber hukum internasional. Prinsip *uti possidetis juris* secara etimologi merupakan bahasa Latin yang berarti "sebagai milik anda" (*as you possess*). Terminologi ini secara historis berasal dari hukum Romawi yang berarti wilayah dan kekayaan lainnya mengikuti pemilik asal pada akhir konflik antara negara baru dengan penguasa sebelumnya.

³⁶ Hasyim, Subagiyo. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017. Hal 16-19.

b) Aspek ekonomi.

Berdasarkan aspek ekonomi, wilayah perbatasan mengalami ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2013-2014, inflasi Kaltara masih mencapai 2 digit. Akan tetapi pada masa jabatan Irianto Lambri Gubernur Kaltara I (tahun 2016 – 2021), inflasi Kaltara sudah turun sekitar 7 persen. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Berdasarkan kesepakatan *Border Trade Agreement* (BTA) Tahun 1970, pada Pasal 3 Tentang Nilai Barang Bawaan, telah disepakati bahwa barang yang diperbolehkan dibawa oleh perdagangan lintas batas melalui jalur darat tidak boleh melebihi 600 Ringgit Malaysia per-orang per-bulan. Sementara untuk perdagangan lintas batas laut tidak boleh melebihi 600 Ringgit Malaysia per-perahu/per-perjalanan³⁷. Ruang lingkup perdagangan dibatasi sampai sejauh 30 km dari daerah perbatasan³⁸, namun pada praktiknya kesepakatan BTA telah dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak menetap di wilayah perbatasan. Hal ini berdampak ada banyaknya barang-barang manufaktur produk Malaysia beredar sampai kota yang jauh dari wilayah perbatasan.³⁹ Kondisi saat ini, belum ada desa di wilayah perbatasan Indonesia yang masuk kategori mandiri, sebagian besar di antaranya masih kategori desa tertinggal.⁴⁰ Hal ini terlihat pada ketersediaan sarana dan prasarana lainnya seperti minimnya ketersediaan pasokan listrik, komunikasi, dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kekurangan ini menghambat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, dan juga terhadap masyarakat karena kebutuhan atas pelayanan dasar tersebut tidak dapat terpenuhi.

³⁷ Lihat: Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. Ditetapkan Pada 24 Agustus 1970.

³⁸ "The flow of goods and services across international land borders within a reach of up to thirty kilometers" dalam Saumiya Mitra, et al, "Cross Border Trade within the Central Asia Regional Economic Cooperation", World Bank, 20 Agustus 2007, hlm. 8

³⁹ Humphrey Wangke. *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 3

⁴⁰ "Belum Ada Desa Mandiri di Wilayah Perbatasan", <https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/1885/belum-ada-desa-mandiri-di-wilayah-perbatasan>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 17.30 WIB.

Pada aspek komunikasi, keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan juga ditemui di wilayah perbatasan. Masyarakat lebih mudah mengakses siaran televisi dan radio dari negara tetangga dibanding televisi dan radio di negara Indonesia. Hal ini dapat berpotensi memberi pengaruh negatif terhadap “pemahaman” penduduk wilayah perbatasan mengenai Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, masyarakat dapat terpapar informasi dengan tinggi dari media dan informasi negara tetangga Malaysia, hal ini berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat mengenai negara tetangga.⁴¹

Kondisi di atas menciptakan kesenjangan antara wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya yang bukan perbatasan, dan bahkan semakin mencolok jika dibandingkan negara tetangga Malaysia. Di sisi lain, pemerintah negara tetangga tersebut memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan wilayah perbatasannya dibanding pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia membangun pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perbatasannya melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan (Kementerian Bappenas, 2004:2). Selain itu, kesenjangan juga ditemui di aspek kesehatan, yaitu tersedianya klinik dan rumah sakit dengan sarana dan peralatan medis serta tenaga kerja yang lebih memadai di wilayah perbatasan Sarawak, seperti di Tebedu dan Serikin (Sarawak). Sarana ekonomi yang tersedia di kecamatan Sei Manggaris juga sangat terbatas. Pasar hanya terdapat di Desa Srinanti. Di wilayah Nunukan, perekonomian belum bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan yang disebabkan tidak adanya pabrik dan sentra pertanian bertaraf besar.

Di desa-desa lainnya tidak terdapat pasar, sehingga untuk memasarkan hasil pertanian penduduk harus membawa ke Nunukan dengan ongkos relatif mahal. Prasarana yang terkait dengan sektor ekonomi seperti jalan usaha tani yang menghubungkan permukiman penduduk dengan ladang/kebun mereka juga tidak ada. Padahal jalan ini, sangat diperlukan oleh penduduk untuk mendukung usaha pertanian mereka.

⁴¹ Mita Noveria. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 3

Kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga membawa konsekuensi terhadap kehidupan keseharian penduduk di wilayah tersebut. Salah satu di antaranya adalah terciptanya ketergantungan terhadap Malaysia dalam berbagai aspek, terutama yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan pasar di dalam negeri, misalnya menyebabkan penduduk di Pulau Sebatik menjual produksi mereka khususnya hasil pertanian dan perkebunan ke wilayah Malaysia.⁴² Dalam kasus ini, harga komoditas yang dijual ditentukan oleh pembeli dari Malaysia.

Permasalahan lainnya yaitu dalam aspek penjualan produk hasil perikanan dan pertanian dan konsumsi masyarakat. Penjualan berbagai komoditas pertanian ke luar negeri tidak hanya didorong oleh kedekatan jarak sehingga biaya transportasi bisa ditekan seminimal mungkin. Masyarakat memilih menjual hasil perikanan dan pertanian ke wilayah Malaysia karena lebih menguntungkan bagi masyarakat. Hal ini tentu merugikan konsumen di Kalimantan Utara karena lebih sulit mendapatkan hasil bumi dari wilayah mereka sendiri.

Selain itu, belum adanya pengusaha lokal yang menerima hasil tani dan tangkapan nelayan Indonesia. Sebagaimana terjadi pada Nelayan Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, nelayan di perbatasan memiliki keterbatasan alat penyimpanan untuk hasil tangkapan ikan seperti *cold storage*. Tempat menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan itu penting dan mendesak untuk mencegah penjualan hasil laut ke Tawau, Malaysia. Beberapa nelayan yang menjual ikan dan udang hasil tangkapannya terpaksa dipasarkan ke Tawau. Alasannya, di Sebatik belum ada pengusaha yang mau menampung ikan perolehan nelayan. Nelayan di perbatasan mengalami kerugian bila harus menyimpan sendiri ikannya tanpa *cold storage*, ini menjadi alasan nelayan menjual ke Tawau Malaysia, sementara jika disimpan terlalu lama, nelayan rugi karena ikannya membusuk.⁴³ Sebaliknya sebagian kebutuhan sehari-hari

⁴² Latifa, dkk. *Penduduk dan kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2006. Hal 43-44.

⁴³ "Alasan Nelayan Sebatik Setor Ikan ke Malaysia", <https://nasional.tempo.co/read/629101/alasan-nelayan-sebatik-setor-ikan-ke-malaysia>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

masyarakat dipenuhi melalui barang-barang yang berasal dari Malaysia. Barang-barang konsumsi seperti bahan makanan, minuman, dan bahkan gas untuk masak dibeli oleh pedagang dari Malaysia.

Sebagian besar barang-barang pangan yang dibutuhkan penduduk berasal dari Malaysia. Gula, minyak goreng, dan gas yang digunakan penduduk Kalimantan Utara berasal dari produk Malaysia. Untuk komoditas garam, sekitar 70 persen berasal dari Malaysia. Sebagian besar barang-barang Malaysia yang beredar di kecamatan Sei Manggaris dibeli oleh pedagangnya di Nunukan, namun ada pula yang dibeli langsung di negara tetangga tersebut dan dibawa melalui jalan tikus tanpa pemeriksaan. Terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, tentara yang tergabung dalam Satgas Pamtas ditempatkan di perbatasan Sekaduyan Taka – Serudong. Di wilayah ini terdapat pos perbatasan gabungan, yaitu TNI dan Tentara Diraja Malaysia, yang baraknya terletak berdampingan dalam wilayah yang termasuk teritorial Indonesia.

c) Aspek Fisik dan Infrastruktur.

Dalam aspek fisik dan infrastruktur, terdapat ketertinggalan pembangunan wilayah perbatasan dalam aspek fisik dan infrastruktur yang berdampak pada ketergantungan yang tinggi masyarakat di wilayah perbatasan pada negara tetangga. Banyak kebutuhan penduduk yang tinggal di perbatasan tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber dari dalam negeri, sebaliknya mereka memperolehnya dari negara tetangga. Hal ini terlihat dari kondisi jalan, akses jalan darat yang bagus di wilayah perbatasan Malaysia yang dapat mendukung perjalanan penduduk perbatasan Indonesia untuk mencari pengobatan di wilayah negara tetangga tersebut. Hal ini dapat ketergantungan sebagian penduduk perbatasan terhadap negara tetangga Malaysia. Krayan terletak di Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Akses dari Krayan ke Malinau dan Tarakan hanya bisa ditempuh melalui pesawat kecil. Hal ini membuat ongkos logistik pangan menjadi mahal. Hampir 95%

kebutuhan sehari-hari didatangkan dari Malaysia. Peralnya akses ke negara tetangga lebih mudah dibandingkan ke Malinau atau Tarakan.⁴⁴

Di samping untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunan serta untuk membeli berbagai barang kebutuhan sehari-hari, ketergantungan tersebut juga dalam bentuk penyediaan modal bagi sebagian penduduk wilayah perbatasan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi mereka. Tidak hanya dari aspek ekonomi, ketergantungan kepada negara tetangga bisa pula terjadi pada aspek sosial. Pelayanan kesehatan yang lebih baik di Malaysia menyebabkan sebagian penduduk wilayah perbatasan Kalimantan Timur memilih untuk memperoleh pengobatan di negara tetangga tersebut. Apalagi, pihak pemberi pelayanan di negara tersebut adakalanya memberi kemudahan bagi penduduk wilayah perbatasan Indonesia untuk memperoleh pengobatan.

d) Aspek Sumber Daya Alam.

Dalam aspek pengelolaan SDA, masalah yang masih dirasakan di kawasan perbatasan antara lain adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam seperti di sektor pertambangan dan pertanian dalam hal distribusi ke masyarakat. Hal ini sebagaimana terlihat di wilayah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor pertambangan dan pertanian. Bahan pertambangan yang utama dari kabupaten ini adalah batubara yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di sektor pertanian, kabupaten ini memiliki potensi berbagai jenis tanaman pangan seperti padi dan buah-buahan, komoditas perkebunan seperti coklat dan

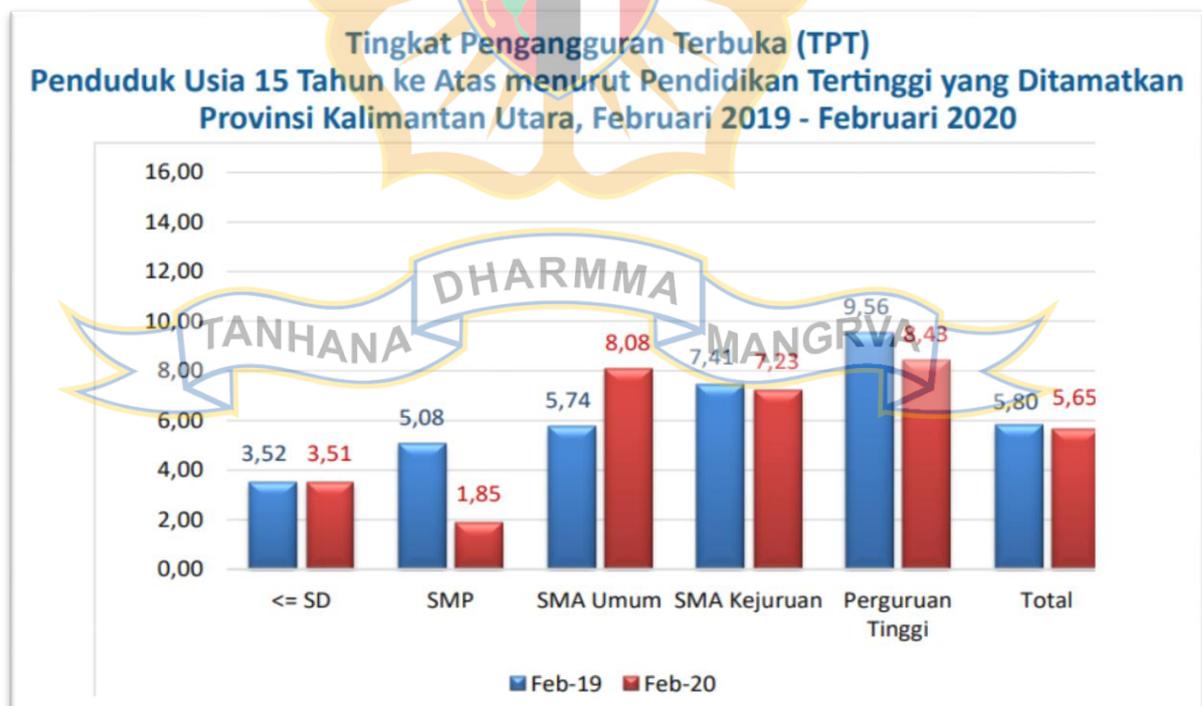
kelapa sawit, serta berbagai jenis sumber daya laut yang besar volumenya. Beras lokal yang dihasilkan oleh petani dari daerah Krayan sangat dikenal di Malaysia. Akan tetapi karena masih lemahnya perlindungan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan, beras unggulan yang dikenal dengan nama "Adan"

⁴⁴ "Warga RI di Perbatasan Gantungan Pasokan Pangan dari Malaysia", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4826669/warga-ri-di-perbatasan-gantungan-pasokan-pangan-dari-malaysia>, diakses pada 20 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

dijual ke Malaysia dan oleh pedagang di negara tersebut kemudian dikemas dan dijual kembali ke negara lain seperti Brunei Darussalam dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Komoditas pertanian lainnya di wilayah perbatasan Indonesia yang juga sangat dikenal di Malaysia adalah pisang, yang diproduksi sangat besar oleh wilayah Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara. Seperti komoditas pertanian lainnya, Malaysia merupakan pasar utama produksi pisang dari kecamatan di pulau Sebatik. Untuk sub sektor perkebunan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menghasilkan kelapa sawit dan kakao dalam jumlah besar, kecamatan penghasil kelapa sawit yaitu Sebatik, Sembakung, Nunukan, Sebuku, dan Lumbis.⁴⁵

- e) **Aspek Sumber Daya Manusia.** Dalam hal aspek SDM, kualitas SDM di wilayah Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Hal ini tercatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 tercatat sebesar 71,15.⁴⁶ Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara pada Februari 2020 sebesar 5,65 persen atau



⁴⁵ Noveria, Op.Cit., hal 46.

⁴⁶ "Provinsi Kalimantan Utara", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-utara> diakses pada 25 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

sebanyak 20.867 orang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding TPT Februari 2019 yang sebesar 5,80 persen (20.681 orang).⁴⁷

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2020 sebanyak 51,79 ribu (6,80 persen). Sebelumnya, pada September 2019,

**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
September 2019-Maret 2020**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
September 2019	514.485	184.597	699.082	22,06	4,86
Maret 2020	526.226	188.266	714.492	23,35	5,06
Perdesaan					
September 2019	453.992	169.923	623.915	26,55	9,00
Maret 2020	460.249	172.338	632.586	28,43	9,46
Kalimantan Utara					
September 2019	488.970	178.863	667.833	48,61	6,49
Maret 2020	499.050	181.985	681.035	51,79	6,80

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2019 dan Maret 2020

penduduk miskin berjumlah 48,61 ribu (6,49 persen). Hal itu berarti jumlah penduduk miskin bertambah 3,2 ribu orang atau meningkat 0,31 persen. Jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan masih lebih besar 9,00 persen pada bulan September 2019 dibandingkan dengan penduduk miskin yang berada di wilayah perkotaan dengan persentase sebesar 4,86 persen.⁴⁸

Berbagai keterbatasan dalam aspek dukungan ekonomi, belum optimalnya fisik dan infrastruktur, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam, serta masih rendahnya sumber daya manusia yang terjadi pada masyarakat di perbatasan dapat mengusik rasa nasionalisme mereka, misalnya karena adanya anggapan tidak mendapat perhatian

⁴⁷ Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Utara Februari 2020, No.26/05/65/Th. VI, 05 Mei 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, hlm. 1-8.

⁴⁸ Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Utara Maret 2020, No. 35/07/65/Th. CI, 15 Juli 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, hlm. 1-5.

dari negara. Selain itu, kuatnya pengaruh dari luar negeri dalam kehidupan keseharian mereka dalam kelamaan juga dapat mengusik rasa nasionalisme penduduk wilayah perbatasan. Berbagai keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan ketergantungan yang tinggi masyarakat perbatasan terhadap Malaysia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mudah dipengaruhi oleh pihak luar Indonesia yang bermaksud mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya atas hubungan dengan Indonesia.

Dari **aspek Keamanan** permasalahan batas negara ditemukan masih banyak jalan tikus ke negara Malaysia. Akibat longgarnya perbatasan, terutama dari pihak negara tetangga berakibat pada masih adanya kelonggaran dan kemudahan dari pihak masyarakat Indonesia dalam hal akses untuk berbelanja dengan harga yang lebih murah dari produk dalam negeri.

14. Perbaikan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan

Kondisi ekonomi di perbatasan dapat dianalisis dalam dua teori yaitu Teori Kebijakan Publik dan Teori Ekonomi. Dalam **teori kebijakan publik**, Easton (1969) mendefinisikan, kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Pembangunan perbatasan telah menjadi perhatian pemerintah, terutama di bawah pemerintah Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita I yang berfokus pada pembangunan aspek infrastruktur, dan Nawacita II yang berfokus pada pembangunan SDM.

Dari perspektif kebijakan publik, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki kemandirian dibutuhkan pelaksanaan kebijakan publik yang baik. Menurut Suharno (2010) dapat terwujudnya kebijakan publik ditentukan oleh beberapa variabel, yaitu tujuan yang akan dicapai, preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, lingkungan yang mencakup lingkungan sosial,

ekonomi, politik, dan sebagainya, serta strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.⁴⁹

Dalam hal penguatan kebijakan publik terkait kemandirian ekonomi masyarakat wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sepakat bahwa tujuan dari adanya kebijakan publik adalah sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alenia empat, yaitu "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sementara itu, visi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah "TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA ", serta 15 misi provinsi, antara lain Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik; Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja; serta Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan. Berdasarkan data dan analisis di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Pusat dan Provinsi memiliki kesamaan tujuan dalam menyejahterakan masyarakat.

Menurut ekonom asal Amerika Serikat, Schumpeter (1942) menyebutkan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship). Terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara, menurut data BPS Kalimantan Utara, terdapat penurunan kondisi perekonomian. Ekonomi Kalimantan Utara triwulan IV tahun 2020 bila dibandingkan triwulan IV tahun 2019 (y-on-y) tumbuh sebesar -4,76 persen mengalami kontraksi pertumbuhan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, secara spasial, pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Kalimantan tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 2,27 persen

⁴⁹ Suharno. *Dasar Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Penerbit Ombak, 2013, hlm. 21.

dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara yang tumbuh - 1,11 persen.⁵⁰ Dapat dicermati bahwa kondisi perekonomian di seluruh wilayah Kalimantan selama pandemi berlangsung, terdapat penurunan, dengan kondisi perekonomian terbaik adalah di Kalimantan Utara. Beberapa sektor produksi, yang mencapai pertumbuhan tertinggi dicapai di lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, serta pengolahan sumber daya mineral. Di sisi lain, penyebab menurunnya perekonomian (kontraksi) adalah pada sektor Penyediaan Akomodasi dan makan Minum.

Mengacu pada Schumpeter, untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah maka perlu dilakukan akselerasi proses inovasi, dengan pelakunya adalah para pengusaha. Sebagai sebuah provinsi yang terbilang baru, jumlah pengusaha di Provinsi Kalimantan Utara masih sangat terbatas. Berdasarkan data statistik, pada kelompok usia 25–34 tahun, tercatat terdapat sebesar 19 persen pengusaha UMK di Kalimantan Utara berada di kelompok usia ini. Selanjutnya, kelompok usia 35–44 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah pengusaha UMK terbesar di Kalimantan Utara sebesar 36 persen dari total pengusaha UMK. Sementara itu, terdapat 27 persen pengusaha UMK pada kelompok umur 45–54 tahun.⁵¹ Melihat latar pendidikan yang banyak dimiliki oleh sebagian besar pengusaha UMK di Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Padahal, perekonomian wilayah Kalimantan Utara memiliki potensi besar pada pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, dan pengolahan sumber daya mineral seperti batubara dan migas. Untuk itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memaksimalkan pelatihan-pelatihan atau kursus yang berguna bagi pengusaha UMK. Hal ini akan bermanfaat sebagai penunjang tingkat inovasi dan kreativitas produksi. Sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing dan tentunya menguntungkan pengusaha UMK di Kalimantan Utara.

⁵⁰ Diakses dari <https://kaltara.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/282/ekonomi-kalimantan-utara-tahun-2020-tumbuh--1-11-persen-dibandingkan-tahun-2019--c-to-c---tumbuh-0-14-persen-dibandingkan-triwulan-iii-2020--q-to-q---dan-ekonomi-kalimantan-utara-triwulan-iv--2020-dibandingkan-triwulan-iv-2019-tumbuh--4-76-persen--y-on-y-.html> pada 28 Juli 2021 pukul 14.00 WIB

⁵¹ Diakses dari <https://korankaltara.com/pengusaha-muda-di-kaltara-masih-sangat-minim/> pada 28 Juli 2021 pukul 14.00 WIB.

Langkah selanjutnya adalah perlunya perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penemuan, inovasi serta mitigasi risiko wirausaha dalam membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya inovasi yang dimulai dari para pengusaha, maka diharapkan pengusaha Kalimantan Utara dapat berinovasi tidak hanya dengan mencari tahu bagaimana menggunakan penemuan, tetapi juga dengan memperkenalkan alat produksi baru, produk baru, dan bentuk organisasi baru.

Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi akibat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelolaan sumber daya alam tersebut belum optimal. Lingkungan di Kalimantan Utara dalam cakupan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya karena masih provinsi yang sangat baru sangat mendukung untuk terwujudnya kesamaan pandangan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Akan tetapi, tantangan utama politik di wilayah perbatasan adalah begitu besarnya paparan informasi dan daya tarik dari wilayah negara tetangga Malaysia. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat yang digunakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi ketergantungan perekonomian masyarakat pada wilayah perbatasan dalam masa Pandemi Covid-19 dapat dilihat dalam aspek hukum dan kebijakan, aspek kerja sama ekonomi dengan negara tetangga, aspek sarana dan prasarana transportasi dan perekonomian, serta aspek komunikasi, sebagai berikut:

a. Visi, Misi, dan Peraturan Pemerintah

Dalam aspek hukum dan kebijakan, Presiden RI Ir Joko Widodo telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan menempatkan wilayah perbatasan sebagai tempat strategis untuk dikembangkan. Berikut adalah visi misi pemerintah, serta peraturan terkait perbatasan:

- 1) Pembukaan UUD NRI 1945:** Kebijakan publik akan berjalan bila ada kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan pemerintah dianggap

sebagai kemampuan dalam dan kesanggupan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang pada akhirnya akan membawa keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik diarahkan pada kesejahteraan rakyat yang berarti sentosa dan aman yang menandakan bebas dari gangguan apapun. Kesejahteraan sebagaimana tertuang pada alinea 4 dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menekankan terhadap tujuan negara Indonesia dalam mendirikan, mengembangkan, dan mempertahankan kondisi kita dalam mewujudkan kepentingan seluruh warga negara demi terciptanya jaminan terhadap kesejahteraan umum yaitu berbunyi “...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

- 2) **Nawacita Jilid I:** Sebagaimana tertuang dalam Nawacita jilid I sejak tahun 2014 lalu, wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dalam pembangunan. Dalam Nawa Cita disebutkan pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. Juga dijelaskan Presiden RI Ir Joko Widodo menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Pada poin pertama Nawacita adalah menghadirkan kembali negara di tengah warga negara. Keamanan batas negara berikut kedaulatan wilayah serta perlindungan terhadap sumber daya alam menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden RI Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden saat itu Jusuf Kalla. Pembangunan perbatasan juga termuat dalam poin ketiga dari Nawacita. Presiden dan Wapres RI menekankan pada “membangun Indonesia dari pinggiran”, dimana pembangunan tak lagi terpusat (sentralisasi) di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok (desentralisasi). Dalam hal pembangunan, masing-masing daerah tak harus persis sama dalam melaksanakan pembangunan, perbedaan dalam pembangunan memang perlu dilakukan demi mengakomodasi karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah (desentralisasi asimetris).

Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Untuk itu, langkah utama yang dilakukan adalah pembangunan jalan di pelosok, penguatan pos di perbatasan, pendirian bandara di pulau terdepan, seperti pembangunan Pos Lintas batas Negara (PLBN). Langkah lainnya adalah pembangunan jalan trans papua yang terhubung dengan tol laut yang nantinya akan memperkuat kawasan terdepan Indonesia. Dalam hal pengamanan perbatasan, di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo berorientasi membangun negara menjadi poros maritim dunia dan menetapkan 111 pulau kecil terdepan Indonesia, lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.⁵²

- 3) **Nawacita Jilid II:** Presiden RI Ir. Joko Widodo menekankan pada pembangunan SDM andal. Langkah yang diambil yaitu peningkatan produktivitas, daya saing ekspor manufaktur, penguatan industri hulu strategis. Ada enam langkah strategis yang akan ditempuh, di antaranya penguatan iklim investasi, keterbukaan perdagangan dan keterlibatan di dalam jaringan produksi global. Penguatan kemampuan riset dan pengembangan inovasi, serta akselerasi adopsi teknologi.⁵³
- 4) **Perundangan Tentang Perbatasan:** Landasan dalam pengelolaan perbatasan negara terdapat dalam sejumlah kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terdapat 23 peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan, dan yang paling erat adalah 5 undang-undang, 1 peraturan pemerintah, dan 3 peraturan presiden yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan kawasan perbatasan antara lain:

⁵² "Nawacita Jokowi-JK: Membangun Indonesia dari Perbatasan", <https://news.detik.com/berita/d-3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-perbatasan>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.

⁵³ "Nawacita Jilid II Orientasinya ke Penguatan SDM", <https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2019/nawacita-jilid-ii-orientasinya-ke-penguatan-sdm/>, diakses pada 29 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

- (a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005 – 2025
- (b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- (c) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- (d) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- (e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- (f) Peraturan pemerintah yang terkait erat dengan pengelolaan perbatasan yaitu PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
- (g) Peraturan Presiden terkait dengan pengelolaan perbatasan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional
- (h) Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terluar
- (i) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang badan Nasional Pengelola Perbatasan

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan perangkat kebijakan yaitu kepastian hukum yang merupakan komponen yang penting dalam menciptakan kesejahteraan umum di negara Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum di Indonesia memberikan kepastian bagi warga negara dan negara dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Akan tetapi permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya infrastruktur, anggaran, dan penerapan visi dan misi negara dalam menyejahterakan warga negara.

a) Kebijakan Pro Masyarakat Bawah

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan pengelolaan dan pemanfaatan kedaulatan wilayah Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kondisi ekonomi, geografi, teknologi, yang masih terbatas, kondisi sosial dan budaya, juga kemampuan SDM yang masih terbatas dan rendah. Pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian yang tinggi terhadap perekonomian perbatasan, akan tetapi terdapat beberapa

kendala antara lain masih belum kuatnya perangkat kebijakan, kepastian hukum dan ketegasan pemerintah terkait dengan wilayah dan kegiatan masyarakat di wilayah perbatasan.

Dalam aspek hukum dan kebijakan, Presiden RI Ir Joko Widodo telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dengan menempatkan wilayah perbatasan sebagai tempat strategis untuk dikembangkan. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

1) Kebijakan Pinjaman Lunak.

Sebagaimana langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memberikan bantuan tunai bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Hal ini sangat membantu untuk para pengusaha UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang dalam situasi pandemi seperti saat ini. Pemerintah juga berharap berbagai bantuan ini dapat membantu para pelaku usaha mikro kecil yang terdampak pandemi Covid-19. Efek jangka panjangnya, bantuan ini diharapkan bisa membangkitkan kembali perekonomian nasional. Pandemi Covid-19 tidak hanya menghantam aspek kesehatan, tetapi juga menghantam sektor UMKM yang berakibat pada tutupnya sektor usaha tersebut karena turunnya jumlah dan daya beli masyarakat, serta berdampak pada pemutusan hubungan kerja, dan macetnya pinjaman. Langkah yang dapat dilakukan adalah tetap memberikan kemudahan administrasi akses pinjaman kepada usaha kecil, sehingga usaha dapat tetap berjalan dan tetap menjaga protokol kesehatan.

i) Mendorong Penggunaan Teknologi Digital dan Transaksi Elektronik.

- Upaya untuk mendorong penggunaan **teknologi digital** dan transaksi elektronik yaitu dengan memberikan edukasi dan insentif kepada konsumen dan pelaku usaha yang menggunakan transaksi digital. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Dengan internet pelaku usaha UMKM tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi apapun, untuk menunjang aktivitas usahanya, bahkan sekarang

cenderung dapat diperoleh berbagai macam informasi, sehingga informasi harus disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Hal tersebut mengubah abad informasi menjadi abad internet. Dengan tidak adanya kepastian kapan krisis dan pandemi ini akan berakhir, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan usaha berjalan dan tetap menjaga protokol kesehatan, yakni dengan penggunaan teknologi dan transaksi jual beli secara daring.

- **Dalam aspek *coverage blank spot*** juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disebabkan masih adanya wilayah *blank spot* di daerah Kalimantan Utara sehingga jaringan dari Malaysia masuk di wilayah Indonesia, dan dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah perbatasan. Siaran televisi Malaysia banyak digunakan di wilayah perbatasan. Sebagai provinsi dengan cakupan wilayah yang luas, Kalimantan Utara saat ini masih memiliki setidaknya 51 *blank spot* sehingga belum dapat menikmati jaringan telekomunikasi, meskipun angka tersebut sudah jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁵⁴

2) Kerja sama Bilateral.

Dalam aspek kerja sama dengan negara tetangga, perlu adanya kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah dalam meregulasi dan mengatur kerja sama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia (bilateral). Hal ini disebabkan adanya potensi peluang pengembangan fasilitas ekonomi dari negara tetangga karena masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana di wilayah perbatasan (seperti jalan raya, pasar, dukungan alat seperti cold storage untuk penyimpanan hasil nelayan).

- **Kerja sama dilakukan dalam bentuk Investasi** di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pemerintah Provinsi Kaltara telah

⁵⁴ "Kaltara Sisakan 51 Kawasan Blank Spot", <https://korankaltara.com/kaltara-sisakan-51-kawasan-blank-spot/>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

secara serius menjajaki kemungkinan adanya investasi oleh pemerintah daerah, sebagai upaya kerja sama dengan sejumlah pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri, hal ini seperti kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan perusahaan asal Australia, PT Fortescue Future Industries (FFI). Pemprov Kaltara memandang bahwa investasi memang perlu mendapat perhatian pemerintah, hal ini seperti keseriusan tiap investor yang menyatakan kesiapannya menanamkan modal di Kaltara, juga penting untuk menekankan soal orientasi kerja sama tersebut. Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga turut mendorong kalau setiap investor yang masuk di Kaltara mampu mengedepankan aspek kesejahteraan bagi masyarakat dan memperhatikan kelangsungan lingkungan.⁵⁵

- **Pengawasan Batas *Border Trade Agreement* (BTA).** Kerja sama ekonomi yang dapat menjadi langkah strategis dalam mengatasi pedagang melanggar batas BTA (*Border Trade Agreement*). Selama ini perdagangan di daerah perbatasan berlangsung secara informal. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengatur dan meregulasi kegiatan masyarakat tersebut secara formal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan efektivitas perekonomian masyarakat lokal di wilayah perbatasan karena pemerintah menghendaki adanya pertumbuhan perekonomian di wilayah perbatasan. Langkah yang telah dilakukan pemerintah yakni pembangunan PLBN merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya titik pertumbuhan perekonomian di perbatasan dan adanya persaingan, diharapkan adanya peningkatan kualitas baik dari SDA maupun SDM perekonomian di wilayah perbatasan.

⁵⁵ "Investor Australia investasi Rp180 triliun di Kaltara", <https://www.antaraneews.com/berita/2166726/investor-australia-investasi-rp180-triliun-di-kaltara>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

15. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perbatasan untuk Meningkatkan Rasa Nasionalisme

a. Kondisi Perekonomian Masyarakat di Perbatasan

Kondisi perekonomian di perbatasan yang masih terbatas dan belum optimal dapat mempengaruhi lemahnya rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan. Pada 2010 lalu, Indonesia pernah menghadapi situasi sekitar 2.000 penduduk di perbatasan yang memilih pindah kewarganegaraan untuk mendapatkan penghidupan dan kesejahteraan yang lebih baik, hal ini dipicu oleh kesenjangan infrastruktur.⁵⁶ Hingga saat ini masyarakat perbatasan lebih mudah mengakses kebutuhan dasar dari negara tetangga (makanan, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan) dibandingkan dari Indonesia sendiri yang disebabkan oleh terbatasnya akses.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan menyejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Perbatasan Indonesia sebagai beranda terdepan negara, seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma di masa lalu yang masih berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan pusat, berakibat pada masih rendahnya pembangunan di wilayah perbatasan yang secara umum masih tertinggal dari daerah Indonesia lainnya.

Terdapat tiga aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan perbatasan yaitu masih lemahnya aspek ekonomi, masih rendahnya sarana prasarana dan infrastruktur, masih rendahnya sumber daya manusia, masih belum optimalnya pemanfaatan sumber kekayaan alam, dan ancaman keamanan karena masih banyaknya jalan tikus dan minim pengawasan. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada mudahnya luntarnya nasionalisme penduduk di wilayah perbatasan.

⁵⁶ "Kesenjangan Infrastruktur Picu 2.000 WNI Jadi Warga Malaysia", <https://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/03/kesenjangan-infrastruktur-picu-2.000-wni-jadi-warga-malaysia>, diakses pada 3 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Kondisi yang dialami di perbatasan adalah masih minimnya inovasi dan teknologi yang dimiliki oleh warga negara di perbatasan, kondisi ini disebabkan karena minimnya pengetahuan, sulitnya akses infrastruktur, dan terbatasnya akses teknologi komunikasi. Di sisi lain, penduduk di wilayah perbatasan lebih mudah mengakses kebutuhan mendasar seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, bahkan akses komunikasi dan televisi ke negara tetangga. Kondisi ini berdampak pada mudahnya terpapar penduduk di wilayah perbatasan terhadap nilai-nilai asing.

Kebutuhan akan pemahaman nasionalisme ini di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan sebab di wilayah perbatasan Indonesia terdapat kemajemukan dan keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan dan agama, di satu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa. Letak Geografis Provinsi Kalimantan Utara yang berada di daerah perbatasan menjadikan kondisi yang rawan akan tindak kriminalitas, pencurian ikan, narkoba, dan perampokan, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga dan mengelola nilai-nilai kebangsaan, tidak ada artinya nilai-nilai kebangsaan ini hanya kita diskusikan pada kegiatan ini tanpa adanya implementasi/praktik dalam kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi di atas diperlukan pembangunan Budaya Berkarakter Kebangsaan dan Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Perbatasan.

a. Ancaman Menurunnya Nasionalisme di Perbatasan

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*), dimana sangat dibutuhkan inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Selain itu, perlu juga diperhatikan penguatan semangat nasionalisme di wilayah perbatasan melalui pendidikan formal sejak diri.

Nasionalisme menurut Hans Kohn didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara bangsa.⁵⁷ Kondisi nasionalisme di perbatasan semakin lemah yang disebabkan oleh komitmen warga, lemahnya penyelenggara negara, juga akibat faktor keterbatasan akses terhadap pusat perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut Ernest Renan mendefinisikan nasionalisme sebagai *le desir de vivre ensemble* (keinginan untuk hidup bersama) yang didasarkan pada kesatuan jiwa, rasa, dan karsa yang melewati proses penyadaran diri sebagai kesatuan kolektif. Nasionalisme kebangsaan merupakan cara untuk mendorong bagaimana globalisasi sendiri dapat dikendalikan untuk memajukan kepentingan nasional.⁵⁸

Nasionalisme kebangsaan berperan dalam menyediakan rasa aman dan stabilitas, menciptakan kembali sentimen keutuhan dan kesinambungan dengan masa lalu antarwarga-negara. Menguatnya identitas lokal juga perlu dilihat sebagai strategi dalam merumuskan kembali nilai-nilai nasionalisme (Soebhan, et al., 2017). Oleh karena itu, haruslah diperhatikan oleh pemerintah agar pembangunan dapat dioptimalkan dengan memperhatikan identitas lokal sebagai khazanah kearifan lokal. Lebih dari itu, peserta didik juga harus didik dengan baik agar memiliki wawasan yang luas dan tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan negara tetangga.

Untuk menguatkan semangat nasionalisme peserta didik, strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di daerah perbatasan adalah dengan mengembangkan strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal. Dengan menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian dari upaya membangun identitas bangsa, dan

⁵⁷ Dwijo Atmoko. *Nasionalisme di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma, 2006, hlm. 41

⁵⁸ Soebhan, dkk. *Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer; Sebuah Kajian Konseptual*. Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017, hlm. 38.

sebagai penyeleksi (filter) pengaruh budaya lain yang dapat mempengaruhi budaya daerahnya.

Atas hal tersebut, dapat dilihat bahwa kuatnya berbagai dimensi di masyarakat, yakni ekonomi, sarana dan prasarana, infrastruktur, keamanan, sumber daya manusia, sumber daya alam dapat berdampak pada menguatnya ketahanan nasional. Pemberdayaan masyarakat dalam untuk kemandirian perekonomian untuk menggali potensi local baik fisik maupun non fisik yang ada dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan jalan bagaimana potensi lokal dapat dibangun sehingga berdaya guna, memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik.

Kemandirian ekonomi dapat dicapai dengan menjamin semua aspek dari masyarakat, baik hardware maupun *software*, seperti memberikan pelatihan/ kursus – kursus, keterampilan dan keahlian di bidang usaha yang berkolaborasi dengan teknologi, serta memberikan pemahaman nasionalisme, wawasan kebangsaan sejak dini di sekolah pendidikan formal.

Apabila optimalisasi kemandirian ekonomi masyarakat dapat tercapai dengan mengedepankan rasa kepedulian dan mandiri sebagai bangsa yang berwawasan kebangsaan serta mempunyai ciri khas gotong royong, hal tersebut akan meningkatkan rasa Nasionalisme masyarakat sehingga juga memperkuat Ketahanan Nasional di wilayah tersebut.

Pemerintah telah menetapkan otonomi daerah untuk meningkatkan kekuatan dan memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah yang ditujukan untuk mengelola wilayah masing-masing di sisi lain berimplikasi dapat memperlemah rasa kesatuan masyarakat sebagai bagian dari negara yang besar. Selain itu juga berakibat pada bergantungnya pembangunan dan pengembangan daerah pada anggaran daerah, baik dalam pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, maupun dengan pembangunan SDM (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya). Bagi daerah yang memiliki penghasilan besar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan baik, sementara bagi wilayah perbatasan secara umum berada pada kondisi terbatas dan miskin.

Pandemi Covid-19 telah membuat berbagai perubahan bagi kondisi perekonomian secara meluas di Indonesia, termasuk di wilayah perbatasan. Perekonomian di perbatasan yang bertumpu pada perekonomian mikro sangat bergantung pada ketersediaan pasok dan permintaan dari masyarakat. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus Covid-19 serta gelombang kedua yang kini tengah terjadi di Malaysia, telah berdampak pada pengetatan perbatasan negara tersebut. Sementara itu, masyarakat di wilayah perbatasan sangat bergantung pada pasokan dan kebutuhan dari negara Malaysia.

Dengan adanya pengaruh teknologi yang semakin canggih sehingga setiap orang dapat bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat memudahkan semangat menjaga identitas nasional dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, akibat dari rendahnya sumber daya manusia, rendahnya kesejahteraan masyarakat yang disebabkan karena kurangnya pelayanan sosial yang menjangkau masyarakat di daerah perbatasan. Faktor penyebab lainnya adalah terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena keterbatasan sarana dan prasarana sehingga mampu memudahkan nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan. Saat ini tercatat masih terdapat *blank spot* di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, dan baru terbangun sekitar 6 BTS.

b. Upaya Membangun Masyarakat di Perbatasan

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan pemahaman nasionalisme di perbatasan dalam aspek *hardware* dan *software*. Dalam aspek *hardware* sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu peningkatan kondisi fisik sebagai dukungan perekonomian (pasar, sarana dan prasarana, komunikasi teknologi dan informasi, dan sebagainya), sementara itu dalam aspek *software* yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme melalui pendidikan formal yang dimulai sejak dini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Sosialisasi Secara Sistematis dan Berkelanjutan

Sosialisasi Secara Sistematis dan Berkelanjutan Diperlukan adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk masyarakat di wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan Utara. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Utara akan pentingnya kemandirian dan urgensi perbatasan bagi NKRI. Untuk itu, diperlukan langkah dari kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan perbatasan berupa sosialisasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, yaitu Kementerian Polhukam dalam aspek keamanan, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) sebagai penentu kebijakan program di perbatasan dan pelaksana teknis, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pembangunan infrastruktur yang juga berperan dalam membuka keterisolasian wilayah, dan Kominfo yang berperan dalam percepatan pemerataan layanan telekomunikasi di desa dan wilayah perbatasan termasuk peraturan perundangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peran Kominfo dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi. Selama ini masyarakat di perbatasan sulit mendapatkan sinyal dari telekomunikasi lokal, akan tetapi lebih mudah mendapatkan akses sinyal dari negara lain.

2) Pengembangan SDM dan Pendidikan Kebangsaan

Beberapa permasalahan di wilayah perbatasan dapat mengurangi ketangguhan dan ketahanan bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat, dan dapat berakibat pada terancamnya keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan nilai gotong-royong yang ditanamkan pada generasi muda terutama pada peserta didik yang diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah secara formal. Upaya penguatan nasionalisme melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Juga perlu diperhatikan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang berbasis kearifan lokal ini

bertujuan agar peserta didik mampu berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam membendung hal-hal negatif yang dapat melunturkan rasa nasionalisme masyarakat di daerah perbatasan demi terjaganya persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kondisi penduduk di wilayah perbatasan umumnya berada pada garis kemiskinan dan memiliki pendidikan yang masih rendah, sehingga kawasan perbatasan pun sulit untuk berkembang. Hal ini berdampak pada pemahaman penduduk di perbatasan tentang kepemilikan dan penggunaan PLBN dalam perlintasan tradisional masih kurang sehingga membuat keamanan di perbatasan menjadi rawan, seperti masih adanya pengiriman TKI Illegal ke Malaysia, penyelundupan narkoba, *Illegal Fishing* dan *Illegal Logging*. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Bappenas dalam percepatan pendidikan penduduk secara merata, maka strategi pembangunan pendidikan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan secara merata, meningkatkan peran masyarakat dalam membangun pendidikan, peningkatan profesionalisme guru, mengubah metode pengajaran, peningkatan budaya sekolah, serta pendidikan vokasional, *entrepreneurship* dan karakter.

Melihat besarnya potensi SDA di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, maka pemerintah pusat dan pemerintah provinsi perlu menekankan dalam pengembangan skill siap pakai bagi peserta didik setelah lulus sekolah. Hal yang memungkinkan adalah adanya pelibatan industri dalam pengembangan pendidikan vokasional, baik industri di dalam wilayah Indonesia, maupun negara tetangga dalam hal ini Malaysia. Pendidikan vokasional dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan magang (6 bulan sampai 1 tahun), serta penyelarasan kurikulum (*link match*). Dinas pendidikan perlu memperhatikan lulusan vokasional dan kompeten serta tersertifikasi, dengan memberikan kurikulum dan standar kompetensi berdasarkan keahlian yang dimiliki, mengacu pada standar dua wilayah (Indonesia dan Malaysia), memberikan insentif bagi tenaga pengajar yang mau mengabdikan di wilayah perbatasan. Selain itu perlu juga adanya

pendidikan kewirausahaan di tingkat pendidikan tingkat atas, madrasah aliyah, atau pesantren. Peserta didik juga perlu diberikan pemagangan kewirausahaan, kursus dan pelatihan. Mengingat telah berkembangnya industri di negara tetangga, perlu adanya pembukaan potensi dan peluang kerja sama antar negara dalam hal pemanfaatan fasilitas praktik kerja, beasiswa atau *voucher* pelatihan, pemberian insentif bulanan bagi masyarakat perbatasan yang mau meningkatkan kemampuannya.

Dalam hal aspek pendidikan, perlu ditekankan kurikulum nasionalisme, kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan bagi anak-anak di wilayah perbatasan dengan pendekatan yang mudah dicerna oleh siswa sejak tingkat dasar. Persoalan nasionalisme dan pemahaman Wawasan Kebangsaan di daerah perbatasan cukup memprihatinkan. Beberapa cara dilakukan oleh negara tetangga atau oleh oknum tertentu dengan cara memanfaatkan kelemahan daerah perbatasan dengan memberikan harga yang lebih murah dan akses yang lebih mudah, sementara dari pihak Indonesia sendiri sangat terbatas dalam memberikan perhatian. Hampir dapat dikatakan tidak pernah tersentuh oleh aparaturnegara. Oleh karena itu, penanaman nilai Wawasan Kebangsaan perlu mendapat perhatian dan penanganan segera. Melalui Wawasan Kebangsaan yang kuat dimiliki oleh penduduk yang berdiam di daerah perbatasan dapat menjadi salah satu pencegah dan penangkal munculnya segenap bentuk tindakan yang membahayakan integritas bangsa dan negara RI.

3) Dalam aspek sarana dan prasarana.

Aspek yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan Kalimantan Utara adalah dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur, terutama adalah pembangunan jalan. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan fasilitas jalan raya di wilayah Kalimantan Utara. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara, bahwa jalan di

perbatasan sudah mulus, bahkan penduduk di wilayah Kalimantan Utara. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembangunan jalan dari Krayan menuju Malinau. Karena jalan di wilayah tersebut akan dapat memecah akses darat warga Krayan dan Malinau. Pembangunan di wilayah tersebut akan membantu masyarakat yang tergantung pada moda transportasi udara saja. Dampak ke depan dari pembangunan sarana transportasi darat adalah akan semakin mudahnya distribusi jalur logistik di wilayah perbatasan, seperti di wilayah Krayan.

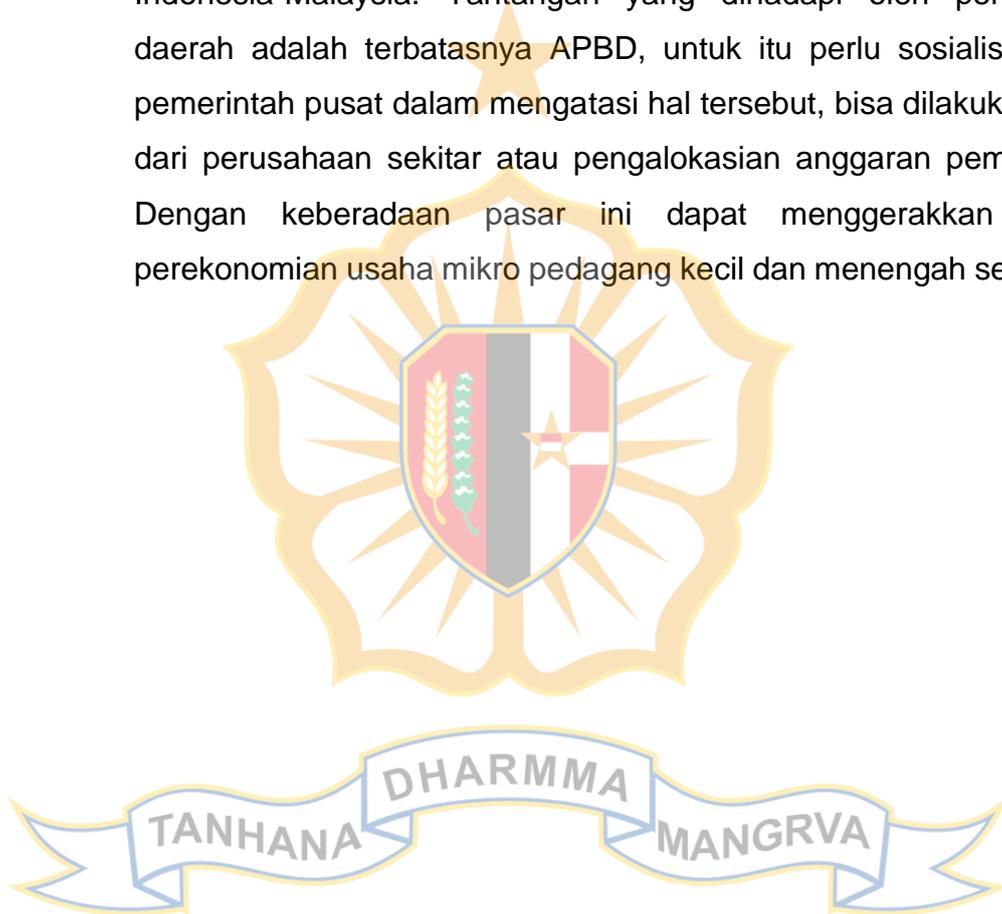
Masih terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kalimantan Utara juga berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Komoditas perdagangan di wilayah Kaltara masih didominasi oleh barang-barang yang berasal dari negara lain, seperti tembakau dan produk olahan tembakau lainnya yang berasal dari Singapura. Produk tersebut kemudian dikemas ulang dan dijual kembali ke Malaysia. Berdasarkan kontribusinya, rokok Singapura menyumbang 100 persen kinerja impor Bulan Februari 2021. Mengingat di waktu yang bersamaan, tidak ada impor kelompok tambang dan hasil pertanian.⁵⁹ Kendala lain akibat dari masih rendahnya fasilitas transportasi di Provinsi Kalimantan Utara adalah sulit diaksesnya kebutuhan mendasar seperti gas elpiji seperti yang terjadi di masyarakat pulau Nunukan dan Sebatik. Penyebab kelangkaan elpiji ini dikarenakan distribusi lambat dari Pertamina Balikpapan. Ditambah lagi, pengiriman untuk Pulau Sebatik dan Nunukan berkurang, meskipun stok yang banyak. Selain itu juga terdapat pelaku distributor kebutuhan pokok yang melakukan kecurangan di luar ketentuan pemerintah seperti permainan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).⁶⁰

Permasalahan lainnya di wilayah perbatasan, terutama di wilayah Kalimantan Utara adalah masih belum maksimalnya pasar

⁵⁹ "Rokok Singapura Masih Mendominasi Impor Kaltara", <https://korankaltara.com/rokok-singapura-masih-mendominasi-impor-kaltara>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.30 WIB.

⁶⁰ "Elpiji di Krayan Mampu Saingi Petronas", <https://korankaltara.com/elpiji-di-krayan-mampu-saingi-petronas>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 25 Mei 2021.

yang berfungsi sebagai sentra logistik untuk belanja kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Sentra pasar modern pertama di Kaltara yang dibangun adalah Pasar Modern Nunukan dengan menggunakan dana APBD. Akan tetapi di wilayah lainnya di Kaltara masih perlu ditingkatkan pembangunan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap masih sulitnya masyarakat di perbatasan untuk menjual hasil pertanian atau melautnya. Diharapkan dengan adanya pasar mampu mengangkat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah terbatasnya APBD, untuk itu perlu sosialisasi dari pemerintah pusat dalam mengatasi hal tersebut, bisa dilakukan CSR dari perusahaan sekitar atau pengalokasian anggaran pemerintah. Dengan keberadaan pasar ini dapat menggerakkan sektor perekonomian usaha mikro pedagang kecil dan menengah setempat.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan.

Tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi sepuluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sejajar dengan Tiongkok, Amerika Serikat dan India. Pada praktiknya, daerah perbatasan memiliki dilema tersendiri untuk dihadapi, mulai dari ketergantungan perdagangan lintas batas negara, pelanggaran keimigrasian, sampai dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang berdampak pada krisis sosial, ekonomi dan keamanan yang akan menjadi ancaman.

Dari penjelasan di atas serta dalam pembahasan di BAB III, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

- a. Ketergantungan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara tetangga dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kesejarahan, aspek ekonomi, serta aspek fisik dan infrastruktur.
- b. Kebijakan publik akan berjalan bila ada kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan dalam dan kesanggupan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan tindakan hukum yang pada akhirnya akan membawa keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik diarahkan pada kesejahteraan rakyat yang berarti sentosa dan aman yang menandakan bebas dari gangguan apapun.
- c. Dalam aspek kerjasama dengan negara tetangga, perlu adanya kebijakan baik pemerintah pusat dan daerah dalam meregulasi dan mengatur kerjasama ekonomi dengan negara tetangga Malaysia (bilateral). Hal ini disebabkan adanya potensi peluang pengembangan fasilitas ekonomi dari negara tetangga karena masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana di wilayah perbatasan.
- d. Kebutuhan akan pemahaman nasionalisme ini di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan sebab di wilayah perbatasan Indonesia terdapat kemajemukan dan keragaman suku, budaya, bahasa, etnis, golongan dan agama, disatu sisi merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan

positif dalam pembangunan bangsa. Namun di sisi lain, mengandung potensi konflik yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi titik retak persatuan dan kesatuan bangsa.

17. Rekomendasi.

Seluruh upaya revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur (hardware) dan tata kelola (software) wilayah perbatasan sangatlah penting untuk direalisasikan melalui Administrasi Kebijakan Publik (*Public Policy*), mengingat wilayah perbatasan merupakan penopang/penyangga terdepan NKRI. Secara psikologis, masyarakat di daerah perbatasan juga akan merasa lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga nasionalisme akan terus terjaga dan terpelihara dengan baik.

Adapun agar semuanya dapat berjalan dengan baik optimal, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini Pemerintah perlu segera melaksanakan program revitalisasi fungsi PLBN sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi distribusi ekonomi, ekspor-impor dan keimigrasian.
- b. Pemerintah bersama tokoh masyarakat dan tenaga paramedis perlu terus berupaya mengedukasi masyarakat terhadap bahaya pandemi Covid-19 dan bagaimana penanggulangannya.
- c. Pemerintah bersama pengusaha perlu terus berupaya menciptakan peluang usaha bagi masyarakat perbatasan, sehingga pemerataan kesejahteraan mereka lebih terjamin.
- d. Pemerintah perlu meningkatkan pasokan kebutuhan bahan pokok, obat-obatan, dan alat kesehatan kepada masyarakat di perbatasan sehingga mereka hidupnya tidak tergantung pada negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

- Agung, Ida Anak Agung Gde. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Penerbit: Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Penerbit: Pustaka Setia Bandung, 2014.
- Atmoko, Dwijo. *Nasionalisme di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2006.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. *Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2020*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Kalimantan Utara Februari 2020*, No.26/05/65/Th. VI, 05 Mei 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. *Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Utara*, Maret 2020, No. 35/07/65/Th. CI, 15 Juli 2020.
- Blanchard, Jean-Marc F. "Linking Border Disputes and War: An Institutional-Statist Theory", dalam *Geopolitics*, No.10, 2005.
- Hasyim, Subagiyo. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme: Arti dan Sejarahnya*, Penerbit Erlangga Jakarta, 1985.
- Latifa, Ade dkk. *Penduduk dan kemiskinan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, 2006.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha, Jawa tengah, 2020.
- Mitra, Saumiya dkk. *Cross Border Trade within the Central Asia Regional Economic Cooperation*, World Bank, 20 Agustus 2007.
- Moeldoko. "Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan.Tinjauan dari Perspektif Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Indonesia", dalam *Jurnal Pertahanan*, Maret 2012 Vol 2, No 1.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinan*, Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1987.

Muni, Joao. *Aspek-Aspek Desentralisasi Teori dan Aplikasi State Border Governance Timor Leste-Indonesia*, Penerbit Qiara Media, Cetakan Pertama 2019.

Noveria, Mita. *Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Perspektif Multidimensi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.

Sardjono, Sigit. *Ekonomi Mikro - Teori dan Aplikasi*. Penerbit: Andi, 2019.

Soebhan, dkk. *Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer; Sebuah Kajian Konseptual*. Penerbit: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2017.

Suharno. *Dasar Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Penerbit Ombak, 2013.

Wangke, Humphrey. *Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Website.

Putra, Bagas Hidayat. "Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebijakan Keimigrasian Indonesia", <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1412-pengaruh-pandemi-covid-19-terhadap-kebijakan-keimigrasian-indonesia>, diakses pada 14 April 2021 pukul 14.00 WIB.

Damanhuri, Didin S. "Kemandirian Ekonomi: Strategi pembangunan ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional atas asing", <https://www.republika.id/posts/7494/kemandirian-ekonomi>, diakses pada 14 April 2021 pukul 15.13 WIB.

Rahardjo, Dawam. "Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu", <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/publikasi/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-filsafat-ilmu>, diakses pada 19 April 2021 pukul 14.00 WIB.

Purwanto, Antonius. "Provinsi Kalimantan Utara", <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-utara>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 18.30 WIB.

"Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$), 2020", <https://kaltara.bps.go.id/indicator/8/229/2/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

"Kepala BNPB bentuk Satgas COVID-19 perbatasan Indonesia - Malaysia", <https://www.antaraneews.com/video/2048694/kepala-bnpb-bentuk-satgas-covid-19-perbatasan-indonesia-malaysia>, diakses pada 14 April 2021 pukul 13.47 WIB.

"Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran di Indonesia Naik 9,7 Juta Orang", <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah-pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang>, diakses pada 14 April 2021 pukul 14.00 WIB.

"Nilai Neraca Perdagangan (Juta US\$), 2020", <https://kaltara.bps.go.id/indicator/8/229/2/nilai-neraca-perdagangan.html>, diakses pada 10 Maret 2021 pukul 12.00 WIB.

"Corona dan ekonomi dunia yang merana", <https://www.antaraneews.com/berita/1793745/corona-dan-ekonomi-dunia-yang-merana>, diakses pada 19 April 2021 pukul 12.00 WIB.

"Penyesuaian Anggaran untuk Penanggulangan Covid-19, Pemprov Kaltara Siapkan Rp 111 M", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/20/penyesuaian-anggaran-untuk-penanggulangan-covid-19-pemprov-kaltara-siapkan-rp-111-m?page=2>, diakses pada 18.30 WIB.

"Dinkes Kaltara Pesan Enam Unit GeNose C19 dan 8.500 Kantong Tiup, Alokasikan Rp 70 Juta per Unit", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/22/dinkes-kaltara-pesan-enam-unit-genose-c19-dan-8500-kantong-tiup-alokasikan-rp-70-juta-per-unit?page=2>, diakses pada 18.00 WIB.

"Keluar Masuk Tarakan Kalimantan Utara via Speedboat Masih Diperbolehkan, Larangan Mudik Lebaran 2021", <https://borneo24.com/seputar-borneo/kalimantan-utara/keluar-masuk-tarakan-kalimantan-utara-via-speedboat-masih-diperbolehkan-larangan-mudik-lebaran-2021>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 17.00 WIB.

"PPKM Mikro Kembali Berlaku di Kalimantan Utara, Wagub Kaltara Yansen Sebut Bukan Pengekangan", <https://kaltim.tribunnews.com/2021/04/30/ppkm-mikro-kembali-berlaku-di-kalimantan-utara-wagub-kaltara-yansen-sebut-bukan-pengekangan>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.

"Update Corona India: AS dan Inggris Kirim Ventilator dan Bahan Vaksin", <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/26/163000165/update-corona-india--as-dan-inggris-kirim-ventilator-dan-bahan-vaksin?page=2>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

"Covid-19 Global, Filipina Negara ASEAN Kedua Tembus Sejuta Kasus", <https://tekno.tempo.co/read/1457365/covid-19-global-filipina-negara-asean-kedua-tembus-sejuta-kasus/full&view=ok>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

"Singapura temukan klaster COVID di rumah sakit saat kasus lokal naik", <https://www.antaraneews.com/berita/2130982/singapura-temukan-klaster-covid-di-rumah-sakit-saat-kasus-lokal-naik>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.30 WIB.

"Thailand catat rekor harian baru 21 kematian dalam gelombang III COVID", <https://www.antaraneews.com/berita/2132590/thailand-catat-rekor-harian-baru-21-kematian-dalam-gelombang-iii-covid>, diakses pada 1 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

"Gelombang Ketiga Covid-19, Malaysia Catat Rekor 6.075 Kasus Baru", <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/60a5d6e99ec5b/gelombang-ketiga-covid-19-malaysia-catat-rekor-6075-kasus-baru> diakses pada 21 Mei 2021 pukul 21.00 WIB

"Australia larang kedatangan dari India, pelanggar hadapi bui dan denda", <https://www.antaraneews.com/berita/2132534/australia-larang-kedatangan-dari-india-pelanggar-hadapi-bui-dan-denda>, diakses pada 1 Mei 201 pukul 21.00 WIB.

"Belum Ada Desa Mandiri di Wilayah Perbatasan", <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1885/belum-ada-desa-mandiri-di-wilayah-perbatasan>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 17.30 WIB.

"Alasan Nelayan Sebatik Setor Ikan ke Malaysia",
<https://nasional.tempo.co/read/629101/alasan-nelayan-sebatik-setor-ikan-ke-malaysia>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

"Warga RI di Perbatasan Gantungkan Pasokan Pangan dari Malaysia",
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4826669/warga-ri-di-perbatasan-gantungkan-pasokan-pangan-dari-malaysia>, diakses pada 20 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

"Provinsi Kalimantan Utara",
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerah/provinsi-kalimantan-utara>
diakses pada 25 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

"Nawacita Jokowi-JK: Membangun Indonesia dari Perbatasan",
<https://news.detik.com/berita/d-3459960/nawacita-jokowi-jk-membangun-indonesia-dari-perbatasan>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 18.00 WIB.

"Nawacita Jilid II Orientasinya ke Penguatan SDM",
<https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2019/nawacita-jilid-ii-orientasinya-ke-penguatan-sdm/>, diakses pada 29 Mei 2021 puku 19.00 WIB.

"Kaltara Sisakan 51 Kawasan Blank Spot", <https://korankaltara.com/kaltara-sisakan-51-kawasan-blank-spot/>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.00 WIB.

"Investor Australia investasi Rp180 triliun di Kaltara",
<https://www.antaraneews.com/berita/2166726/investor-australia-investasi-rp180-triliun-di-kaltara>, diakses pada 28 Mei 2021 pukul 19.00 WIB.

"Kesenjangan Infrastruktur Picu 2.000 WNI Jadi Warga Malaysia",
<https://www.tribunnews.com/nasional/2010/06/03/kesenjangan-infrastruktur-picu-2.000-wni-jadi-warga-malaysia>, diakses pada 3 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

"Rokok Singapura Masih Mendominasi Impor Kaltara",
<https://korankaltara.com/rokok-singapura-masih-mendominasi-impor-kaltara>,
diakses pada 25 Mei 2021 pukul 20.30 WIB.

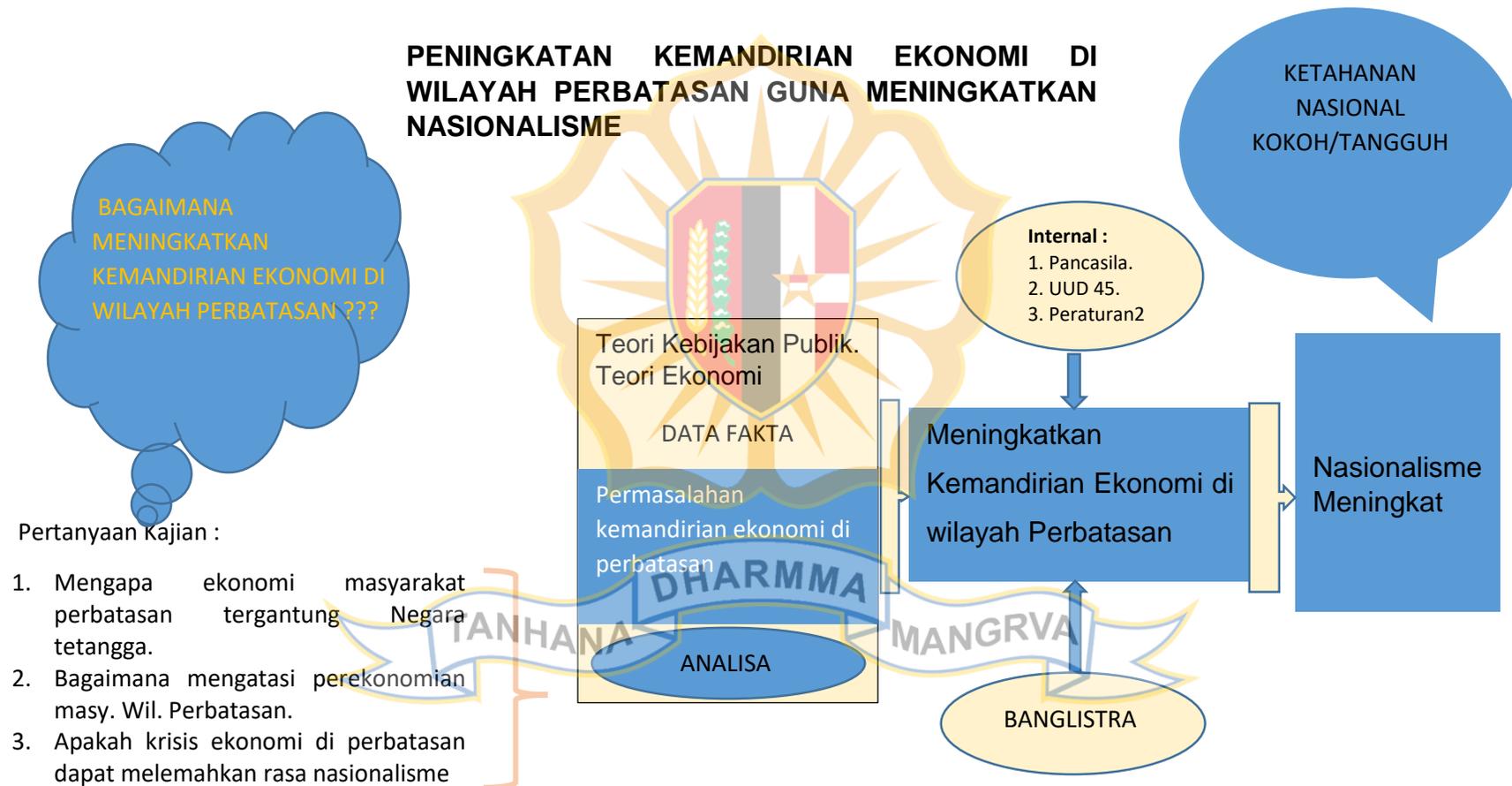
"Elpiji di Krayan Mampu Saingi Petronas", <https://korankaltara.com/elpiji-di-krayan-mampu-saingi-petronas>, diakses pada 25 Mei 2021 pukul 25 Mei 2021.

Arsip

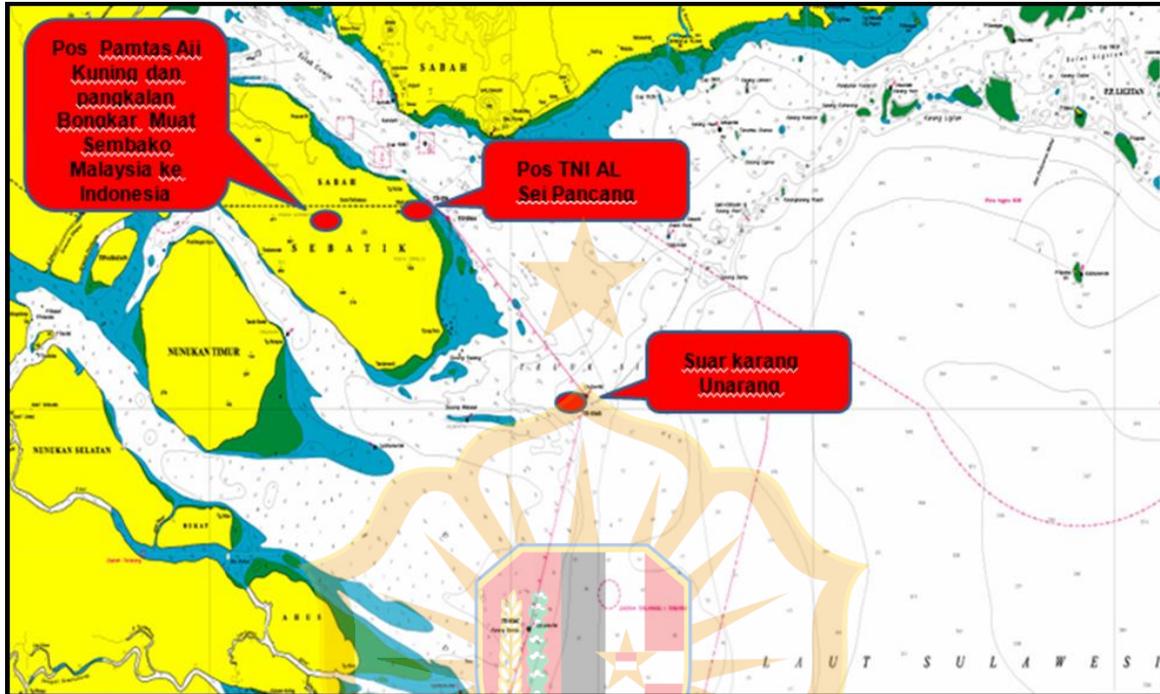
Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia. Ditetapkan Pada 24 Agustus 1970.



ALUR PIKIR



GAMBAR 1



PETA WILAYAH PERBATASAN DAN BONGKAR MUAT MALAYSIA –
INDONESIA DAN POS TNI AL.(periksa BAB II, hal 10)



GAMBAR 2



KONDISI PASAR TRADISIONAL DI PERBATASAN.

Kondisi pasar tradisional tersebut diatas merupakan gambaran saat ini, artinya dari dulu tidak ada perubahan sehingga masyarakat perbatasan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya masih bergantung pada Negara tetangga

(periksa BAB III hal 31)



GAMBAR 3



**KONDISI MASYARAKAT PERBATASAN ADA YANG MASIH DALAM
GARIS KEMISKINAN**

Pemberian Bantuan sosial oleh TNI kepada masyarakat perbatasan yang masih dalam garis kemiskinan(periksa BAB III, hal 35)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Eddy Tarjono
Pangkat, Korp, Nrp : Kolonel Laut (P) Nrp. 10078/P
Jabatan, Kesatuan : Kasubdit.Mingiattadik
 Debiddikkatnas Lemhannas RI.
Agama : Islam,
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 23 Agustus 1970
Alamat : Jl. Tanjung Pinang No. 61 Sby
Status : Kawin / K4

Pendidikan umum : SD, SMP, SMA

Pendidikan Militer : AAL 37/91, Dikpasiswa IV, Diklapa 1/SBA, Diklapa II/ Koum, Seskoal/ dikreg 45. Dik. Lemhannas RI/ PPRA 62 Th. 2021

Kursus- kursus : Sus.Pakom, Sus.Embarkasi, Sus.Scuba Diver, Sus.Paidikla, Sus. Dan.KRI, Sus. Danlanal, Sus.

Riwayat Kepangkatan : Letda/ 1991, Lettu/1994, Kapten/1998, Mayor/ 2004/, Letkol/ 2008. Kolonel/ 2018.

Riwayat Jabatan

- Di Kapal : Asspadivkom, Padiivkom, Kadepsenbah, palaksa, Komandan
- Di Darat : Lanal : Pasops, Palaksa
 Lantamal : Dansatkamla, kadisyahal.
 Kolatarmatim : Kasi. Evaluasi Puslatjabsus, Palaksa.
 Satuan kapal Amphibi : Kasiopslat, pasops.
 Satuan kapal Eskorta : Pasops.
 Guskamlatim : Pabandyarenops, Pabanops.
 Lemhannas RI : Kabag.Protokol Rohumas Lemhannas RI, Kasubditmingiattadik Dedikpimkatnas Lemhannas RI

Riwayat Penugasan :

- Operasi Muhibah misi perdamaian th 1997 : India, Afrika, Mesir dan Ukraina.(pelayaran selama 100 hari)
- Inspectian submarine Simulator : Jerman (Bremen)/ 2017
- Uji Tempur L1/L2 kapal selam Nagapasa : Korea (Okppo)/ Galangan kapal selam PT DSME Korea Selatan/ 2017

Tanda Brevet.

- Kapal Permukaan.
- Kapal selam.(Tanda brevet Kehormatan)
- Penyidik.
- Pin Seskoal.
- Pin Akademi TNI.
- Pin Komandan KRI.

Tanda Kehormatan.

- Satya Lencana VIII th
- Satya Lencana XVI th
- Satya Lencana XXIV th
- Dharma Nusa.
- Seroja.
- Bhakti sosial.
- Dwija sista

Data Keluarga.

- Istri : 1 (satu) orang.
- Anak : 4 (empat) orang (3 perempuan dan 1 laki – laki)

